



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**DEMOKRASI SEBAGAI RUANG KOSONG : KRITIK TERAPEUTIK  
CLAUDE LEFORT TERHADAP POLA KUASA TOTALITARIANISME**

**SKRIPSI**

**RICHARD LOSANDO  
00292536**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA  
PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT  
DEPOK  
JUNI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**DEMOKRASI SEBAGAI RUANG KOSONG : KRITIK TERAPEUTIK  
CLAUDE LEFORT TERHADAP POLA KUASA TOTALITARIANISME**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Humaniora**

**RICHARD LOSANDO**

**0706292536**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA**

**PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT**

**DEPOK**

**JUNI 2010**

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia.

Jakarta, 13 Juni 2011

**RICHARD LOSANDO**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : RICHARD LOSANDO

NPM : 0706292536

Tanda Tangan :

Tanggal : 13 Juni 2011

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Richard Losando  
NPM : 0706292536  
Program Studi : Ilmu Filsafat  
Judul Skripsi : Demokrasi Sebagai Ruang Kosong : Kritik Terapeutik  
Claude Lefort Terhadap Pola Kuasa Totalitarianisme.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Ilmu Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Budiarto Danurjaya ( )  
Penguji : Dr. Donny Gahril Adian ( )  
Penguji : Dr. Naupal S.S., M.Hum ( )  
Ditetapkan di :  
Tanggal :

Dekan  
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya  
Universitas Indonesia

Dr. Bambang Wibawarta  
NIP. 196510231990031002

### KATA PENGANTAR

Hingga akhir pengerjaan skripsi ini, tak mungkin lagi dapat saya sangkal, kontribusi orang-orang disekitar saya. Mereka memberikan semangat, inspirasi, tempat menghela nafas, berbagi tawa dan ceria, tempat memaksimalkan potensi ke-*freak*-an. Hingga kata pengantar ini, saya dedikasikan untuk mereka.

**Kepada The Supreme Being alias “ Tuhan Yesus Kristus”**, Tuhan dan sahabat, yang memberikan semangat dan kekuatan dalam segala kehidupan saya. Dari awal hingga akhirnya pengerjaan skripsi ini, semata-mata kemurahan kasih-Nya kepada saya.

**Among dan Mama**, Orang tua dan sahabat, yang senantiasa ada di rumah. Terima kasih karena sudah senantiasa mendoakan saya di setiap doa kalian. Karena saya tahu di doa Among dan Mamaku ada namaku disebut.

**Benhard Hamongan Manurung dan Christine Sada Putri Manurung**, adik-adik saya, terima kasih untuk doa kalian juga, terima kasih sudah selalu menodong *pizza*. Semoga kalian juga bisa sukses dalam studi kalian.

**Veronika Dwi Utami**, merupakan kado spesial yang diberikan Tuhan kepada saya, dipenghujung masa mahasiswa. Terima kasih atas doa, semangat, dukungan, senyum hangat anda mampu meredakan kegalauan skripsi saya dan tidak lupa, terima kasih juga karena sudah mau menerima saya apa adanya, termasuk ke-*freak*-an saya. *He..He..He*

**Budiarto Danurjaya**, pembimbing, orang yang sangat saya kagumi, orang yang menjadi inspirasi hidup saya, idola saya, dosen *postmodernism* yang sangat selalu menjadi alas an untuk memperkokoh kepercayaan saya kepada *postmodernism*. Terima kasih atas semua bimbingan, ajaran kehidupan, pengetahuan filsafatnya kepada saya. Semoga bapak akan terus mengingat nama saya.

**Donny Gahral Adian**, penguji skripsi, terima kasih karena telah memperkenalkan filsuf *post-foundational* ini kepada saya. Berkat Pak Donny, saya memberanikan untuk menjadikan penelitian skripsi saya ini.

**Naupal**, Pembimbing Akademis sekaligus penguji saya. Terima kasih atas pertanyaan bapak yang membangkitkan *sense of reality* saya.

**Saudara sedarah filsafat 2007**, terima kasih kepada, gang *RAKH*, **Richard Losando**, **Angga**, **Kari** dan **Haree** atas persahabatan selama 4 tahun di dalam filsafat (maaf saya meninggalkan kalian lebih dahulu. –hahahahha-). Selanjutnya terima kasih kepada sahabat sesama anak kereta, **Hery Dwi Prasetyo** dan kawannya **Panji Prasetyo** serta **Leo Panji Mahendra**. Terima kasih semua dari pada kalian. Selanjutnya terima kasih kepada **Sabrina Salsalina** dan **Chandra Bientang**. Kedua perempuan filsafat yang juga merupakan sahabat saya. Selanjutnya **Aufira Utami** alias **Iqit**, **Reni angraeni**, **Efriani effendi** alias **Era**, **Fitri Kumalasari**, **Tika Sylvia Utami** Terima kasih kalian merupakan orang-orang yang sangat penting selain huba-huba. Selanjutnya **Rizkyia Dian Maharani**, **April**, **Tea**, **Taufik**, **Nila**, **Winni**, **Alfa**, **Cony** kalian saudara di dalam filsafat saya, Selanjutnya Gang Politics, **Adit**, **Bang Djo**, **Weber**, **Fachri**, **Dipa**. Ayo kobarkan semangat filsafat politik kita.

**Saudara-saudari di Persekutuan Oikumene FIB UI**, AKK saya yang terkasih, **Arga**, **Ziyo**, **Bernardo**, **David Hume**, **David Novum**, **Diego**. *Maaf ya ampe lulus ga bisa kelar MHB nya*. Selanjutnya untuk Tesie Tim Inti 2007, **Metha Dwi Karina Tamberongan** dan **Imelda Valentina Rajaguguk**. Terima kasih untuk pelayanan yang sama-sama kita jalani, terima kasih atas semua, *maaf ya kalo banyak dosa kepada kalian*. *Hehehe*. Terima kasih juga kepada TKK saya, **Lucky Andika Putra** dan **Rully Setiawan**, mungkinkah kita KTB? Selanjutnya juga kepada TKK saya lagi, **Andikha Riandito** berserta kekasihnya, **Lira Widayat Sulistri**, terima kasih atas dukungan kalian. Selanjutnya untuk PKK saya, **Kak Yuliana Yao** dan **Kak Risky Nado Josua Silitonga**, terima kasih atas bimbingan kalian selama saya di kampus ini. Selanjutnya untuk teman-teman pengurus tahun 2010-2011, terima kasih untuk kebersamaan dalam pelayanan kita.

**Saudara-saudari di Persekutuan Oikumene Universitas Indonesia**, terima kasih kepada teman-teman saya di PO FISIP, **Tabhita Hutagalung**, **Stefiani Sirait**, **Donna Wihelmina Hutagalung**, terima kasih atas doanya, Terima kasih juga kepada teman saya di PO FIK, **Lisayana Suci Lestari Sembering**, terima kasih atas doanya, teman saya di FKD3, **Witry Okta Sidauruk**, terima kasih juga atas doanya. Terima kasih juga untuk teman-teman PO FIB 2007, **El bram Apriyanto Nainggolan**, **Isabella Manurung**, **Hosea Hannah Benna**, **Sarwa**

**Damayanty Sipayung, Christopher Cynar Saulinggi** Selanjutnya, terima kasih untuk teman-teman PO PSIKOLOGI, **Junita Sinaga** untuk doanya

**Para Dosen Filsafat Universitas Indonesia**, terima kasih kepada dosen-dosen saya, yang telah memberikan sebagian pengetahuannya kepada saya, semoga pengetahuan yang saya dapat akan selalu berguna untuk menjalani kehidupan ini. Selanjutnya Mbak Dwi, terima kasih untuk bantuan teknis dalam urusan skripsi saya.

**Carl Schmitt**, Filsuf filsafat politik favorit saya, semoga saya, jika diberikan kesempatan untuk melanjutkan studi, berkesempatan untuk melakukan penelitian mengenai pemikiran filsuf ini.

**Claude Lefort**, Filsuf filsafat politik yang meninggal pada tanggal 3 Oktober 2010, skripsi ini saya dedikasi untuk mengenang pemikiran beliau.

Depok, 13 Juni 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Richard Losando  
NPM : 0706292536  
Program Studi : Ilmu Filsafat  
Departemen : Filsafat  
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya  
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Masjid Kadilangu, Demak: Sebuah Kajian Seni Bangunan beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 13 Juni 2011  
Yang menyatakan

(Richard Losando)

## ABSTRAK

Nama : Richard Losando

Program Studi : Ilmu Filsafat

Judul : Demokrasi Sebagai Ruang Kosong : Kritik Terapeutik Claude  
Lefort Terhadap Pola Kuasa Totalitarianisme.

Totalitarianisme memiliki bahaya yang mampu mengancam demokrasi. Ancaman totalitarianisme dapat terlihat dalam pola kuasa lama. Bahaya totalitarianisme tersebut misalnya kekuasaan yang didasari oleh garis keturunan. Dalam term lefort disebut sebagai penanda kepastian. Penanda kepastian ini pada pola kuasa lama memenuhi ruang kuasa, sehingga individu yang berada di luar kekerabatan raja tidak dimungkinkan untuk ikut serta berkuasa. Melihat kondisi seperti itu, Lefort mencoba untuk melakukan kritik terhadap pola kuasa totalitarianisme tersebut. Cara yang ditempuh Lefort untuk menyelamatkan bahaya totalitarianisme Dengan mengosongkan ruang kuasa. Bagaimana cara untuk mengosongkan ruang kuasa? Menurut Lefort, agar ruang kuasa dapat kosong dengan melakukan pembubaran terhadap penanda-penanda kepastian yang ada pada pola kuasa lama.

Kata Kunci :

Totalitarianisme, Pola Kuasa, Demokrasi, Isonomia, Terapeutik, Ruang kosong, *post-foundationalism*.

## ABSTRACT

Name : Richard Losando

Study Program: Philosophy

Title : Democracy As An Empty Space: Claude Lefort Therapeutic

Critique Totalitarian Power Pattern

Totalitarianism has the danger that could threaten democracy. Threat of totalitarianism can be seen in the old power patterns. Dangers of totalitarianism such as power based on lineage. In terms Lefort referred to as markers of certainty. Bookmark this certainty on the pattern of the old power meets space power. So that individuals who are outside of kinship king allowed to participate in power. see conditions like that, Lefort trying to do the critique of totalitarianism is the power pattern. Lefort way in which to save the dangers of totalitarianism with the power of empty space. How to create space power? according to Lefort, for empty space with the power to perform the dissolution of the markers of certainty on the pattern of the old power.

Key Words :

Totalitarianism, Pattern Power, Democracy, Isonomia, Therapeutic, empty place, post-foundationalism

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	2
1.3. Tujuan Penulisan .....	2
1.4 Kerangka Teori.....	3
1.5 Metode Penelitian.....	4
1.6 Thesis Statement .....	5
1.7 Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB 2 TOTALITARIANISME SEBAGAI SISTEM POLITIK</b>	
2.1 Totalitarianisme ditinjau secara etimologis.....	6
2.2 Totalitarianisme ditinjau secara historis .....	9
2.2.1 Sejarah totalitarianisme di Uni Soviet .....	9
2.2.2 Sejarah totalitarianisme di Jerman .....	12
2.2.3 Sejarah totalitarianisme di masa kontemporer .....	16
2.3 Totalitarianisme menurut pandangan Hannah Arendt .....	19
2.3.1 Mengapa totalitarianisme dapat terjadi dan apa dampaknya bagi politik .....	23
Ikhtisar.....	26

### **BAB 3 POLA KUASA DEMOKRASI DALAM PANDANGAN LEFORT**

3.1	Perbedaan pola kuasa lama dengan pola kuasa baru menurut Claude Lefort.....	29
3.1.1	Pola kuasa lama .....	29
3.1.2	Pola kuasa baru.....	33
3.2	Politik totalitarianisme dan politik demokrasi .....	36
3.2.1	Politik totalitarianisme .....	36
3.2.2	Politik demokrasi.....	41
3.3	Demokrasi sebagai ruang kosong.....	47
	Ikhtisar .....	51

### **BAB 4 PENUTUP**

4.1	Ikhtisar.....	54
4.2	Kesimpulan.....	57
4.2.1	Mengapa demokrasi mampu mencegah kekuasaan totaliter .....	57
4.2.2	Kritik terhadap kondisi fenomena politik Indonesia saat ini .....	58

<b>DAFTAR REFERENSI</b> .....	62
-------------------------------	----

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sejarah kelam pernah tercatat, ketika demokrasi diberangus oleh agama. Agama berkuasa di segala aspek kehidupan manusia. Agama tidak lagi berbicara mengenai bagaimana caranya untuk mendapatkan kehidupan yang baik setelah manusia meninggal, namun justru sebaliknya, agama menjadi mantra yang sah untuk dijadikan dasar dalam segala aspek kehidupan manusia.

Pada Abad pertengahan ilmu pengetahuan mengalami kemunduran. Pada waktu itu, saat gereja menghegemoni ilmu pengetahuan, Copernicus berhasil menghancurkan otoritas astronomi tradisional yang berasal dari teori Aristoteles dan Ptolomeus yang mengandaikan bahwa bumi adalah pusat semesta. Penemuan ini mengoncangkan teori Astronomi yang dipegang teguh orang gereja. Bahkan, Galileo Galilei berhasil mempertegas teori Copernicus itu, melalui alat penemuannya yaitu teleskop. Ironisnya, penguatan Teori Copernicus ini, justru mengantarkan Galileo kepada inkuisisi yang dilakukan gereja dengan cara mencungkil matanya. (Hardiman, 2005, 11-12)

Demokrasi bukan saja pernah terancam dari totalitarisme dan absolutisme agama, tetapi juga, dari monarki absolutisme yang pernah terekam di dalam sejarah di beberapa negara. Misalnya, di negara Prancis, Jerman, dan juga di Indonesia. Di negara Prancis, monarki absolut sempat dijalankan selama beberapa dekade. Namun pemerintahan monarki absolut ini berakhir setelah terjadi kudeta kepada Louis Napoleon pada tanggal 2 desember 1851. (Tocqueville, 2005,290-291)

Dunia diperingatkan kembali bahayanya jika totalitarisme absolutisme diterapkan. Di Tunisia, rakyat melakukan aksi protes kepada penguasa setempat yang di nilai diktator yang membuat diktator tersebut terjungkal dari kekuasaannya. Aksi protes ini disebabkan oleh penderitaan yang dialami oleh rakyat Tunisia selama

23 tahun dibawah kekuasaan Diktator Ben Ali. Rakyat Tunisia melawan dan pada akhirnya, Ben Ali mundur pada tanggal 13 januari 2011<sup>1</sup>

Runtuhnya pemerintahan Ben Ali di Tunisia, menjadi inspirasi bagi rakyat Mesir untuk menjatuhkan pemerintahan Husni Mubarak. Pemerintahan Mubarak ini dinilai menjalankan pemerintahan yang terkesan diktator. Terbukti dari penderitaan yang di alami oleh masyarakat Mesir selama 30 tahun dibawah pemerintahan Husni Mubarak. Setelah rakyat Mesir memprotes dan melakukan aksi turun ke jalan selama 18 hari, Presiden Husni Mubarak mengundurkan diri.<sup>2</sup>

Rangkaian catatan historis mengenai pemerintahan totalitarianisme, serta gelombang demokratisasi di beberapa kawasan dunia, seperti di Timur Tengah dan Afrika di tahun 2011, ditandai dengan berjatuhnya penguasa diktator di negara-negara tersebut, membuat suatu optimisme baru atas kepercayaan dunia terhadap sistem politik demokrasi yang dinilai lebih humanisme daripada sistem politik totalitarianisme. Atas fakta diatas maka penelitian ini penting untuk dilakukan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut:

1. Mencoba membuktikan bahwa Totalitarianisme memiliki bahaya yang mampu mengancam demokrasi.
2. Mencoba memberi perluasan pemahaman atas demokrasi agar dapat lebih proliferaif<sup>3</sup>.

## 1.3 Tujuan Penulisan

Totalitarianisme merupakan masalah yang menakutkan bagi sejarah kebebasan individu. Kebebasan individu selalu dibayangi oleh cengkaman

---

<sup>1</sup> Berita mengenai Tunisia ini di ambil dari:

<http://internasional.kompas.com/read/2011/01/16/0303438/Presiden.Tunisia.Lari.ke.Arab.Saudi>

<sup>2</sup> Mundurnya Mubarak diambil dari

<http://nasional.kompas.com/read/2011/02/12/04005444/Hosni.Mubarak.Mundur>

<sup>3</sup> Pengertian kata proliferasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1 pembiakan yang subur; 2 pertumbuhan dan pertambahan sel yang sangat cepat.

kekuasaan yang despotik. Bahaya ini bukan marak pada masa modern saja, seperti pada masa Stalin di Uni Soviet dan Hitler di Jerman, tetapi pada masa kinipun, masih ada negara yang menggunakan sistem totalitarianisme seperti di Korea Utara dan beberapa negara di Timur Tengah.

Melihat masih adanya penerapan sistem totalitarianisme di beberapa negara, maka penelitian ini bertujuan untuk memperingatkan kembali bahaya totalitarianisme bagi kebebasan individu dan merupakan musuh utama humanisme. Selain itu, penelitian ini bertujuan juga, untuk menambah khazanah interpretasi terhadap konsep filsafat politik Claude Lefort. Mengingat masih minimnya diskursus mengenai pemikiran *post-foundationalism*,<sup>4</sup> diharapkan melalui tulisan ini mampu memberikan stimulus agar penelitian serupa lebih sering dilakukan.

Disamping itu, penelitian ini saya dedikasikan dan apresiasikan secara khusus untuk sang pemikir yang meninggal 3 oktober 2010. Melalui penelitian ini, pemikiran Lefort, kiranya mampu memberikan kontribusi akademik dalam bidang filsafat politik. Khususnya dalam diskursus filsafat politik di Indonesia.

#### **1.4 Kerangka Teori**

Di dalam penelitian ini, saya menggunakan pemikiran Lefort untuk mengkritik totalitarianisme. Totalitarianisme merupakan sebuah istilah ilmu politik untuk menyebutkan suatu gejala yang secara mengejutkan dalam sejarah umat manusia. Negara yang menerapkan totalitarianisme bukan hanya sekedar mengontrol kehidupan masyarakat dengan ketat dan mempertahankan dengan tegas kekuasaan sebuah elit politik, tetapi juga, melebihi bentuk-bentuk kenegaraan yang menggunakan sistem politik despotik tradisional.<sup>5</sup>

Beberapa negara pernah tercatat di dalam sejarah menggunakan sistem politik totalitarianisme untuk mempertahankan kekuasaannya. Negara-negara yang menggunakan sistem politik totalitarianisme antara lain adalah Uni Soviet, Jerman dan

---

<sup>4</sup> Untuk penjelasan mengenai *post-foundationalism* akan dijelaskan lebih lanjut pada bab 3.

<sup>5</sup> Kata pengantar Franz Magnis-Suseno SJ dalam buku Asal usul Totalitarisme karya Hannah Arendt jilid 3.

Prancis. Negara-negara yang menggunakan sistem politik totalitarianisme ini jelas merupakan musuh besar bagi eksistensi demokrasi.

Di dalam totalitarianisme, kebebasan individu direduksi. Kebebasan dapat menjadi pengganggu stabilitas pemerintahan jika tidak dibatasi. Oleh rezim totalitarianisme, segala unsur yang memiliki potensi untuk merusak kestabilan pemerintahan harus disingkirkan. Oleh karena itu, biasanya di negara-negara yang menerapkan sistem totalitarianisme, memiliki kecenderungan menerapkan sistem partai tunggal.

Kebebasan merupakan anasir yang penting di dalam gerakan melawan totalitarianisme. Gagasan mengenai konsep kebebasan itu sendiri mengalami evolusi makna. Kebebasan pada masa pencerahan adalah setiap orang (sebenarnya hanya setiap warga negara laki-laki) memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan tersebut. (Zakaria, 2004, 24) Konsep kebebasan pada masa pencerahan masih tidak bisa lepas dari isu gender. Artinya, bahwa gerakan kebebasan tersebut belumlah utuh dan holistik. Sedangkan, konsep kebebasan di dalam dunia modern adalah kebebasan individu dari kekuasaan yang sewenang-wenang, yang dalam banyak sejarah berarti kebebasan individu dari kekuasaan brutal negara.

Lefort memiliki beberapa konsep penting di antaranya adalah "*the dissolution of the markers of certainty*" dan "*the place of power is empty*" dalam demokrasi. (Marchart, 2007, 86) Menurut Lefort, bahwa di dalam demokrasi anasir-anasir absolutisme harus dikosongkan dari cengkraman yang membuat aktivitas konflik terhambat. Penanda-penanda kepastian ini harus kita rusak. Mengapa? Karena penanda-penanda kepastian ini merupakan alat untuk melanggengkan totalitarianisme di dalam ruang publik dan di dalam demokrasi. Bagi Lefort demokrasi dapat terjaga eksistensinya dengan cara memcabut atau menyingkirkan penanda-penanda kepastian tersebut, sehingga demokrasi harus menjaga ruang kuasanya tetap kosong.

## **1.5 Metode Penelitian**

Penulisan penelitian ini ditulis menggunakan metode studi pustaka serta menggunakan metode analisa kritis. Studi pustaka digunakan untuk memperoleh gagasan orisinil dari Lefort. Membaca karya sang penulis menjadi salah satu yang saya lakukan untuk dapat memahami keutuhan pemikiran sang pemikir. Setelah itu, penulis baru melakukan penelusuran terhadap buku-buku penunjang. Salah satu buku utama yang saya gunakan adalah *Democracy and Political Theory* yang merupakan karya asli dari sang tokoh. Selanjutnya, setelah melakukan studi pustaka, barulah penulis melakukan analisis kritis dengan memberi kesimpulan terhadap teori yang dikemukakan oleh Lefort.

## **1.6 Thesis Statement**

Totalitarianisme sebagai sebuah sistem politik membahayakan demokrasi. Agar demokrasi bisa tetap proliferaatif, demokrasi membutuhkan ruang kuasa kosong, yang justru tak mungkin terjadi dalam rezim kekuasaan totaliter.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Di dalam penulisan ini, saya membagi menjadi empat bab. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut : Bab 1 merupakan pendahuluan, meliputi latar belakang penelitian, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kerangka teori, *thesis statement*, dan sistematika penulisan. Bab 2 menjelaskan apa yang dimaksud dengan totalitarianisme baik secara etimologi maupun histories, di samping itu dipaparkan juga pandangan Hannah Arendt mengenai Totalitarianisme, Khususnya mengapa totalitarianisme dapat terjadi dan apa dampaknya kepada politik. Bab 3 menjelaskan perbedaan kuasa lama dan baru, serta melihat hubungan antara politik totalitarianisme dengan politik demokrasi menurut Claude Lefort. Selanjutnya, juga menjelaskan teori Lefort tentang demokrasi sebagai ruang kosong, Bab 4 adalah penutup. Dalam bab ini akan memberikan ikhtisar mengenai urgensi masalah totalitarianisme kembali untuk didiskusikan. Selanjutnya, merumuskan kesimpulan seperti yang dipaparkan pada *thesis statement*.

## BAB 2

### Totalitarianisme Sebagai Sistem Politik

Sebagai langkah awal untuk melakukan penelitian filosofis mengenai kritik terhadap totalitarianisme ini, penulis mencoba untuk memaparkan terlebih dahulu permasalahan yang ditimbulkan oleh politik totalitarianisme. Problem yang ditimbulkan totalitarianisme ini dapat dilacak dengan menggunakan beberapa tahapan. Pertama-petama, menelusuri totalitarianisme secara etimologi terlebih dahulu. Tahapan ini berguna untuk memperoleh pemahaman awal dan mendalam mengenai kata totalitarianisme itu sendiri. Selanjutnya, akan dipaparkan lebih lanjut mengenai fakta historis sistem ini, yang pernah digunakan oleh beberapa negara. Sebagai tahap terakhir, pada bab ini akan ditutup dengan mengelaborasi totalitarianisme secara artikulatif filosofis.

#### 2.1 Totalitarianisme ditinjau secara etimologi

Pemahaman yang holistik mengenai totalitarianisme tidak bisa hanya dilakukan dengan mengkaji dari sudut pandang semata. Dalam usaha tersebut, cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengkaji totalitarianisme melalui sudut pandang etimologis, historis dan artikulatif.

Secara etimologi terma totalitarianisme di dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris yakni: *totalitarianism*. *Totalitarianism* terbentuk dari gabungan dua kata yakni, *totalitarian* + *isme*. Totalitarian sendiri berarti sebuah sistem pemerintahan yang terpusat, diktatorial serta menuntut kepatuhan penuh kepada negara. Sedangkan isme adalah sebuah sistem, paham ataupun tipikal ideologi politik. (Oxford : 2011) Oleh Lorens Bagus, totalitarianisme didefinisikan sebagai sebuah sistem sosio-politis yang ditandai campur tangan secara lalim oleh negara yang bersifat otoriter dan birokratis dalam kehidupan masyarakat dan individu-individu. Lorens Bagus menambahkan bahwa di negara yang menerapkan sistem totalitarianisme, negara memiliki kekuasaan untuk menguasai segala golongan dalam masyarakat. ( Bagus, 1996,1114) Oleh karena itu, totalitarianisme adalah sebuah

sistem sosio-politik yang ditandai campur tangan penguasa lalim ke dalam segala aspek kehidupan masyarakat, serta menuntut kepatuhan penuh kepada negara.

Karakteristik totalitarianisme dapat dipahami dengan cara melakukan pengamatan terhadap karakteristik dan fenomena yang terjadi di negara yang menganut monarki absolut dan negara yang menganut sistem politik fasisme. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan totalitarianisme sering kali dibandingkan dengan sistem politik fasisme, akan tetapi sebenarnya totalitarianisme tidaklah sama dengan sistem politik tersebut. Walaupun perbandingan yang dilakukan antara totalitarianisme dengan fasisme ini tidaklah mengherankan terjadi, karena memang seringkali fasisme menjadi rujukan untuk memahami definisi totalitarianisme. (Edward : 150) Hal ini juga yang dilakukan oleh Paul Edward. Bagi dia, usaha untuk menelusuri definisi totalitarianisme haruslah mengacu kepada sistem politik fasisme. Menurut Paul Edward, fasisme merupakan sebuah gerakan ideologi yang dipimpin oleh Benito Mussolini. Ideologi yang berkembang di Italia ini, dimulai pada tahun 1922 sampai dengan invasi yang dilakukan sekutu pada saat perang dunia kedua. Kata fasisme bukannya monopoli untuk doktrin ideologi di Italia semata saja, tetapi kata fasisme ini juga digunakan untuk negara-negara sejenis yang menerapkan sistem serupa seperti di negara Jerman.

Fasisme sebagai sebuah ideologi sangat bangga terhadap dirinya sendiri karena fasisme memiliki kondisi alamiah yang komprehensif di dalam menjalani pemerintahan dengan dibatasi oleh pandangan totalitarianisme. Namun Bagi Gentile, fasisme bukanlah sekedar sebuah metode yang dijalankan pemerintah untuk melanggengkan kekuasaannya semata, tetapi juga bagi sebuah pemikiran filsafat yang menerobos keinginan, pemikiran dan perasaan individu untuk kepentingan negara. (Edward : 183) Segala aspek kehidupan masyarakat harus dikorbankan demi kepentingan negara. Oleh karena itu, maka fasisme juga memiliki pengaruh pemikiran nasionalisme bahkan cenderung *chauvinistic*. Walaupun di negara Jerman juga menerapkan ideologi fasisme, namun Mussolini membantah dengan keras bahwa fasisme yang dianut oleh Italia sama dengan yang diterapkan di Jerman. Mussolini sendiri menolak sikap rasisme yang dilakukan oleh Nazi. Bagi dia manusia bukanlah

alat uji coba untuk memenangkan perlombaan ambisi segelintir orang, tetapi manusia diikat oleh persatuan orang banyak melalui sebuah gagasan nasionalisme. Fasisme bukanlah hanya sekedar harus diterima, tetapi fasisme juga memiliki potensi mengganggu dan mengancam. Fasisme tidak memberikan ruang kepada metode parlemen ataupun demokrasi, yang mana kedua metode tersebut membutuhkan dan menantang masyarakat untuk berpartisipasi.

Kedekatan relasi antara totalitarianisme dengan fasisme dipertegas lagi melalui definisi yang dilakukan oleh *The New Encyclopaedia Britannica*. Menurut *The New Encyclopaedia Britannica*, terma *totalitarianism* sendiri berasal dari terma *totalitario* yang pertama kali dikemukakan oleh diktator Italia Benito Mussolini pada tahun 1920. Mussolini sendiri menggambarkan *totalitario* sebagai sebuah fasisme baru yang lebih jauh lagi dideskripsikan sebagai “*All within the state , none outside the state, none against the state.*” ( *The New Encyclopaedia Britannica* : 1903 : 863).

Sebagai sebuah sistem politik, totalitarianisme tentunya memiliki karakteristik tersendiri, antara lain kekuasaan yang terpusat. Di negara yang menganut sistem totalitarianisme distribusi kekuasaan tidak dimungkinkan terjadi. Kekuasaan dipegang oleh satu orang, sehingga penguasa harus memiliki karakteristik khusus pula agar dapat menjalankan sistem totalitarianisme di negara mereka masing-masing. Para penguasa yang menjalankan sistem totalitarianisme agar dapat menjalankan dan melanggengkan kekuasaannya, kerap kali melakukan segala cara, seperti melakukan teror, menggunakan kekuatan militer hingga sabotase melalui propaganda media.

Jika Paul Edward merujuk kepada fasisme untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan totalitarianisme, maka Simon Blackburn memberikan definisi tersendiri. Menurut dia totalitarianisme adalah sebuah prinsip pemerintahan yang mengacu kepada pemusatan kontrol negara. Negara menjadi subjek yang mengontrol segala institusi baik publik maupun privat. Pendapat Simon Blackburn ini dapat terlihat dari definisi di bawah ini :

*“The principle of government according to which all institutional and private arrangements are subject to control by the state. There are no autonomous association, nor is there any principled of legally recognized private/public distinction.”* (“Prinsip mengenai pemerintahan yang sesuai dengan semua pengaturan kelembagaan baik pemerintah maupun swasta harus dikuasai oleh negara. Tidak ada asosiasi otonom, juga tidak ada prinsip yang membedakan antara hukum swasta atau publik”). ( Blackburn, 2005 : 863)

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan, totalitarianisme adalah sebuah sistem politik yang menekankan kepada pemusatan kekuasaan. Tidak ada kebebasan dan kemandirian masyarakat. Semua kehidupan masyarakat diurus oleh pemerintah.

## **2.2 Totalitarianisme ditinjau secara historis.**

### **2.2.1 Sejarah Totalitarianisme di Uni Soviet**

Totalitarianisme sebagai sebuah sistem politik bukanlah sebuah konsep abstrak yang hanya hadir dalam tataran konseptual semata. Akan tetapi totalitarianisme secara nyata benar-benar eksis dalam sejarah peradaban manusia. Pada kesempatan ini, penulis mencoba memaparkan negara mana saja yang memiliki karakteristik totalitarianisme yang kuat. Adapun yang akan di bahas adalah sejarah totalitarianisme Jerman, Rusia mewakili era modern serta totalitarianisme di Tunisia, Mesir dan Libya yang mewakili totalitarianisme di era kontemporer ini.

Uni Soviet memiliki cara tersendiri dalam menerapkan sistem totalitarianisme. Hal ini tidak mengherankan, mengingat Uni Soviet menjadikan dan menempatkan ideologi Marxisme pada posisi yang sangat sentral. Konsekuensinya adalah sistem politik monopartai dianggap sesuatu kemutlakan. Tidak diperkenankan untuk adanya upaya perlawanan kepada pemerintahan.( Fahrurodji: 2005: 141). Oposisi tidak diberikan ruang, bahkan dihapus karena merupakan ancaman besar bagi pemerintah.

Jika kita melihat kebelakang mengenai sejarah terbentuknya Uni Soviet, maka kuatnya pengaruh pemikiran Marxisme dapat terlihat dengan jelas. Kata Soviet sendiri bisa berarti Dewan, Majelis. ( Fahrurodji: 2005: 137) Penggunaan dan dipilihnya kata Soviet ini sebagai nama pengganti pemerintahan Rusia merupakan

hasil interpretasi terhadap ide-ide Marxisme. Salah satu ajaran dan cita-cita dari Karl Marx adalah masyarakat tanpa kelas. Jika di dalam masyarakat, kelas-kelas sosial sudah dapat dihapus, maka negara tidak perlu dan dibutuhkan lagi. Atas ide tersebut maka pemerintahan setelah Rusia ini, memutuskan menggunakan kata Soviet.

Ideologi Komunisme sebagai tafsiran terhadap ajaran Marxisme telah dinaikan derajatnya di Rusia menjadi agama resmi negara. (Kohn:1966:131) Tidaklah mengherankan jika pemerintah Rusia memaksakan kepada rakyat Rusia untuk mengimani ideologi komunisme tersebut. Pemerintah Rusia sengaja melakukan propaganda agar ajaran komunisme ini dianut oleh rakyat Rusia secara dogmatis.

Beberapa pemimpin tertinggi di Uni Soviet mengamalkan dengan teguh “agama negara” tersebut. Salah satu penguasa yang berpegang teguh terhadap ajaran komunisme ini adalah Stalin. Stalin merupakan pimpinan Uni Soviet yang menerapkan sistem totalitarianisme sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya. Ia memperkuat struktur birokrasi dengan cara menerapkan kebijakan represif terhadap lawan-lawan politiknya. Salah satu kebijakan yang diambilnya adalah dengan membentuk sebuah lembaga Polisi Rahasia yang memiliki tugas mengawasi setiap aktivitas warga negara yang dianggap subversif. (Fahrudji: 2005: 144) Lembaga Polisi Rahasia ini disebut dengan KGB. KGB (*Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti*) merupakan instrumen penting bagi Stalin untuk mempertahankan kekuasaannya.

Selain dia membentuk lembaga Polisi Rahasia, dia juga menerapkan sebuah kebijakan yang kejam dengan membentuk sebuah Direktorat Utama Kamp yang disebut dengan *Glavnoe Upravlenia Lagerei* (Gulag). Gulag adalah sebuah lembaga yang mengelola sistem rumah tahanan (kamp) dan rehabilitasi di seluruh Uni Soviet. (Fahrudji: 2005: 147) Tujuan awal dari didirikannya Gulag ini berubah menjadi “neraka dunia” bagi mereka yang menghuninya. Pemegang otoritas menerapkan sistem ransum (jatah makanan) yang sangat tidak manusiawi. Kondisi tersebut diperparah dengan diterapkan pula kepada mereka jam kerja yang keras. Mereka dipaksa untuk membangun proyek-proyek infrastruktur seperti : jembatan, kanal-kanal besar, jalan raya, jalur kereta dan sebagainya.

Diktator Stalin juga menerapkan kebijakan deportasi. Tujuan kebijakan ini adalah untuk pemindahan berbagai suku bangsa untuk dipindahkan secara paksa ke wilayah-wilayah yang jauh dari tempat asalnya. Sasaran kebijakan deportasi ini adalah suku-suku yang dicurigai terlibat pemberontakan dan pengkhianatan kepada negara. Beruntung, kebijakan ini berakhir setelah Stalin meninggal di tahun 1953.

Kedua lembaga ini ( Gulag dan KGB) menjadi alat represi pemerintah yang menakutkan bagi masyarakat Uni Soviet. Polisi Rahasia yang disebar untuk mengawasi dan membatasi kebebasan rakyat Uni Soviet ini kerap kali membuat rakyat Uni Soviet menjadi korban dari sikap totalitarianisme pemerintah Uni Soviet. Seseorang misalnya, dapat dengan mudah dijebloskan ke dalam penjara karena alasan politik yang tidak pernah dilakukannya. Tidak cukup sampai disitu saja, yang lebih menakutkan lagi adalah apabila seseorang telah menjadi penghuni kamp-kamp konsentrasi, hampir mustahil dapat kembali menghirup udara bebas. Pemerintah Uni Soviet melakukan kebohongan yang tidak bisa dilawan oleh rakyatnya. Hukuman yang seharusnya maksimal 25 tahun, ternyata hanya isapan jempol belaka. Peraturan tersebut hanya sekedar formalitas. ( Fahrurudji: 2005: 148) Melihat fakta tersebut apabila seorang tahanan ingin menghirup udara bebas, maka satu-satunya cara adalah melakukan aksi nekat kabur dari kamp konsentrasi tersebut. Selain cara ini, rasanya mustahil untuk bisa keluar dari “neraka dunia” tersebut.

Stalin menjadi musuh besar bagi demokrasi ketika dia menerapkan kebijakan anti demokrasi. Stalin mengagaskan dan menjalankan ide mengenai “Komunisme Internasional” ( Komintern) pasca Perang Dunia II. Tujuan Komintern ini adalah untuk menjaga kekuasaannya dengan memperkuat birokrasi, represi massal, penghapusan demokrasi dan persamaan nasional. Selain itu, dia juga memakai teror secara sistematis untuk menghancurkan segala perlawanan yang dianggap mengganggu.

Sebenarnya kekejaman yang terjadi di Uni Soviet bukanlah berawal dari pemerintahan Stalin belaka, tetapi sudah mulai terjadi pada saat Lenin menjadi penguasa Uni Soviet. Di bawah kendali Lenin, Uni Soviet tidak berbeda jauh dengan Uni Soviet pada saat Stalin berkuasa. Di bawah pemerintahan Lenin, banyak petani

yang kelaparan. Para petani banyak yang mati kelaparan karena penerapan kerja paksa. penderitaan yang dialami oleh petani bukan sampai disitu saja, pemerintah Uni Soviet bukan saja menerapkan kerja paksa, tetapi mereka juga dipekerjakan melampaui waktu demi kepentingan negara.

Penderitaan yang dialami oleh rakyat Uni Soviet Bukan saja berhenti sampai disitu saja. para petani di Uni Soviet juga kehilangan hak kepemilikan tanah mereka pada tahun 1919. (Kohn :1966: 129) Tanah-tanah petani diserahkan kepada pemerintah untuk dikelola demi kepentingan negara. Petani di Uni Soviet dipaksa untuk bekerja di tanah yang subur milik pemerintahan. Walaupun para petani bekerja di tanah yang subur tersebut, tetap saja tidak mampu memenuhi dan menunjang kebutuhan negara.

Masih banyak penderitaan yang dialami oleh rakyat Uni Soviet. Penderitaan yang mereka alami bukan fisik semata, tetapi juga secara intelektual. Ajaran Marx-Lenin didoktrinkan kepada mereka secara terus menerus. Pemerintah Uni Soviet tidak memberikan ijin mengembangkan pengetahuan di luar Ajaran Marx-Lenin. Tindakan yang dilakukan pemerintah ini, menimbulkan kejenuhan intelektual, mematikan kreatifitas dan memiskinkan imajinasi perubahan kehidupan.

### **2.2.2 Sejarah Totalitarianisme di Negara Jerman.**

Selain di negara Rusia, sistem politik totalitarianisme pernah menjadi bagian di dalam kehidupan orang-orang Jerman. Pada saat Hitler berkuasa, Jerman menjadi negara yang menerapkan sistem totalitarianisme dan menjadikan fasisme sebagai ideologi negara. Selain itu Hitler juga menerapkan beberapa kebijakan yang tidak humanis dan sangat kejam.

Kebijakan yang berbau kekerasan yang dilakukan oleh Hitler antara lain adalah menangkap orang-orang yang dicurigai melakukan penentangan terhadap pemerintah ( Irwanto: 2008 : 62). Hitler tidak segan-segan dan tanpa pandang bulu memberantas habis semua orang yang dianggap tidak sejalan dengan pandangan pemerintah. Semua orang-orang Jerman harus memberikan yang terbaik untuk negara bahkan pengorbanan diri menjadi fenomena lumrah pada waktu itu. Orang-orang

yang dianggap melakukan subversif, digiring oleh pasukan SS ke dalam kamp-kamp konsentrasi. Kamp-kamp konsentrasi ini menjadi saksi bisu kebingungan dan kekejaman Nazi.

Kamp-kamp konsentrasi ini bukan hanya ditujukan kepada orang-orang Jerman saja yang dicurigai melakukan subversif terhadap negara, tetapi Hitler juga membangun kamp-kamp konsentrasi untuk menyiksa orang-orang Yahudi. Bagi mereka musuh terbesar bangsa Jerman adalah orang-orang Yahudi (Irwanto : 2008 : 64). Kebencian Hitler terhadap orang-orang Yahudi terlihat ketika dia mengakui bahwa Bangsa Yahudi merupakan pemimpin berhati dingin, tak punya rasa malu, dan cerdik dalam penyebaran kejahatan yang muncul dan wilayah-wilayah perkumuhan kota. Bukan hanya itu saja, tetapi dia juga mengatakan rasa bencinya terhadap orang Yahudi kembali menyiram ke sekujur tubuhnya. Kebencian Hitler ini, terlihat dari pandangannya mengenai orang Yahudi seperti yang dikutip di bawah ini :

“Ketika pertama kali aku mengakui Yahudi ini sebagai pemimpin berhati dingin, tak punya malu, dan cerdik dalam penyebaran kejahatan yang muncul di wilayah kumuh kota besar ini, rasa benciku kembali menyiram sekujur tubuhku.” ( Hitler : 2007: 72).

Kebencian Hitler terhadap orang-orang Yahudi, diimplementasikan ke dalam propaganda antisemitisme yang diusung oleh pemerintahan Nazi. Dampak dari propaganda ini bukan hanya dirasakan di wilayah Jerman saja, tetapi juga di seluruh wilayah kependudukan Jerman. Hitler memiliki ambisi untuk melakukan pembasmian terhadap orang-orang Yahudi di seluruh eropa.

Di dalam melancarkan misi pemusnahan orang-orang Yahudi, Hitler mempergunakan segenap kekuatan baik militer maupun sipil. Dia menggunakan kekuatan pasukan SS, pasukan *Blackshirts* ( garda pribadi Hitler), serta dukungan dari masyarakat sipil yang juga merupakan simpatisan Hitler ( Irwanto : 2008 : 65 ). Hitler juga menambah kekuatannya dengan membentuk pasukan baru yang secara

khusus diciptakan untuk membantai orang-orang Yahudi di kamp-kamp konsentrasi.<sup>6</sup> Pasukan pembunuh khusus ini dikenal secara umum dengan nama *Einsatz Gruppen*.

Sebagai seorang diktator tentunya harus memiliki karakteristik unggul. Hitler sendiri merupakan orang yang tidak pernah mempercayai siapapun sebagai sekutunya. Di dalam pandangannya, setiap individu itu tidaklah sama. Oleh karena itu, apabila ada yang kuat yang mendapatkan kemenangan adalah sebuah hal yang biasa, karena hal ini memang merupakan hukum alam. Selain itu, Hitler memiliki kemampuan yang luar biasa dalam memainkan psikologis rakyatnya. Dia menggunakan kelebihannya tersebut untuk memperkuat kebijakan-kebijakan politiknya. Hitler juga menganggap dirinya sebagai seseorang yang dilahirkan ke dunia ini dengan memperoleh tanda penyertaan untuk sebuah misi memimpin bangsanya menjadi bangsa yang besar.

Di bawah kekuasaan Hitler, Jerman tidak pernah menggunakan institusi demokrasi apapun. Dia menolak secara tegas mengenai penggunaan cara-cara demokrasi. Kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi, kebebasan memperoleh pendidikan tidak diberikan ruang untuk berkembang. Secara terang-terangan, dia mengatakan bahwa mayoritas bukan hanya merepresentasikan kebodohan tetapi juga kepengecutan. Mayoritas tidak akan pernah mampu menggantikan manusia sejati. ( Alan Bullock, 1962, 37, 40, 41 ).

Walaupun banyak anggapan umum yang mengatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh Hitler hanyalah berfokus kepada orang-orang Yahudi saja, akan tetapi sebenarnya Hitler tidak pandang bulu dalam menerapkan kebijakan lalimnya. Sebagai contoh, Hitler merencanakan untuk menyusun dan memberlakukan undang-undang kesehatan. Undang-undang ini sangat menakutkan. Orang-orang yang memiliki penyakit paru-paru dan jantung di wilayah Jerman harus diasingkan, bahkan – jika diperlukan- dimusnahkan secara fisik. ( Arendt, 1995, 8) Beruntung undang-undang kesehatan ini tidak sempat dilaksanakan.

---

<sup>6</sup> Kamp-kamp konsentrasi yang didirikan oleh Hitler bukan hanya berada di wilayah Jerman saja, Tetapi juga berada di daerah pendudukan Jerman.

Undang-undang kesehatan lainnya yang mencuat pada masa kekuasaan Hitler adalah undang-undang tentang program euthanasia. Hitler sangat membenci orang-orang yang lemah dan berpenyakit. Namun, itulah kehebatan Hitler. Dia menggunakan alibi dengan menggunakan alasan etis untuk membenarkan tindakan euthanasia. Padahal ada dugaan yang mengatakan bahwa sebenarnya motifnya untuk menghemat logistik. Hitler juga mengeluarkan dekret untuk melakukan pembunuhan massal pada tanggal 1 september 1939. Dekret ini bukan hanya ditujukan kepada orang-orang gila saja, tetapi juga orang-orang sakit yang penyakitnya tidak bias disembuhkan. Hanya saja yang menjadi prioritas untuk dibunuh adalah orang-orang gila terlebih dahulu ( Arendt : 1995 : 70).

Masalah undang-undang kesehatan bagi Hitler bukanlah perkara yang tidak penting. Oleh karena itu, Hitler kembali mempertimbangkan untuk memperkenalkan suatu Undang-Undang Kesehatan Nasional, dimana Hitler mendapat daftar orang-orang sakit, terutama penderita penyakit paru-paru dan jantung. Berdasarkan undang-undang ini, keluarga yang terindikasi mengalami penyakit tersebut tidak mampu lagi berada publik dan tidak diperkenankan untuk memproduksi anak. ( Arendt,1995 ,181).

Berkaitan dengan masalah pemurnian ras, dia memiliki propaganda yang dituangkan di dalam *Mein Kampf*. Menurut Hitler, setiap spesies hanya dapat melakukan perkawinan dengan spesies sejenisnya saja, kucing misalnya tidak mungkin melakukan perkawinan dengan anjing. Karena, perkawinan antar beda spesies itu merupakan sebuah penyimpangan. Hitler menambahkan bahkan hukum alam sendiri membenci jenis pernikahan ini. Penolakan Hitler terhadap perkawinan campur dapat terlihat dari pendapatnya yakni :

“ Penyimpangan dari hukum ini hanya terjadi pada kondisi-kondisi luar biasa. Hal ini terjadi khususnya dalam tekanan, atau ketika beberapa halangan menyebabkan perkawinan secara proaktif antara spesies sesama menjadi tidak mungkin. Namun alam, dengan segala kekuatannya, benci akan perkawinan semacam ini. ( Hitler : 2007: 301).

Menjaga kemurnian ras, bagi Hitler merupakan sebuah keharusan. Bagi dia, ras Arya merupakan manusia superior. Ras Arya sendiri dapat digolongkan kategori

pertama. kategorisasi ini disebabkan oleh ras Aryalah yang mendirikan landasan dan membangun dinding-dinding dari setiap struktur terbesar dalam kebudayaan manusia. Ras Arya juga yang telah mendirikan dinding-dinding bata yang megah dan merencanakan datangnya kemajuan semua manusia ( Hitler, 2007,307).

Kehancuran sebuah negara disebabkan karena terjadinya pencemaran darah dan pemerosotan ras. Sebuah negara hancur dan runtuh bukan karena mereka kalah perang, namun disebabkan karena mereka kehilangan tenaga mereka yang merupakan karakteristik dari darah ras murni mereka. ( Hitler : 2007 : 315). Oleh karena itu, setiap peristiwa sejarah di dunia adalah bagaimana caranya mempertahankan kemurnian ras mereka masing-masing.

### **2.2.3 Sejarah Totalitarianisme Pada Masa Kontemporer.**

Sistem totalitarianisme bukan hanya tumbuh subur di negara yang menjadikan fasisme dan komunisme sebagai landasan ideologi negara mereka masing-masing. Pada masa kontemporer, totalitarianisme ternyata masih menyimpan kegelisahan bagi demokrasi. Di awal tahun 2011, beberapa negara yang pemimpinnya menerapkan sistem totalitarianisme mengalami pergolakan. Adapun negara-negara yang mengalami pergolakan di awal tahun 2011 antara lain Tunisia, Mesir dan juga Libya.

Mengenai Tunisia, Ben Ali sampai dengan tumbangny pemerintahannya telah berkuasa selama 23 tahun. Ben ali mulai berkuasa di tanah Tunisia sejak berhasil menggulingkan pemerintahan Habib Bourguiba - yang merupakan presiden pertama Tunisia pasca penjajahan Prancis - pada tahun 1987 melalui pemilu.<sup>7</sup> Bertahan cukup lama kekuasaan Ben Ali rupa-rupanya disebabkan oleh tindakan yang dilakukan oleh Ben Ali yang berhasil menindas partai atau tokoh oposisi.

Ben Ali di dalam meredam aksi protes dan kerusuhan yang melanda tunisia menggunakan pendekatan represif. Pemerintahan Ben Ali mengerahkan panser dan tank untuk meredam kerusuhan tersebut. Di masa-masa aksi protes besar-besaran yang dilakukan oleh rakyat Tunisia banyak cara-cara represif yang digunakan. Cara-cara

---

<sup>7</sup> Diberitakan Kompas pada 26 oktober 2009 dengan judul “Sudah 22 tahun Ben Ali Berkuasa.”

yang digunakan oleh pemerintah Tunisia antara lain, menerapkan jam malam dan larangan keluar malam. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Tunisia ini ternyata malah menyulutkan emosi dan memprovokasi masyarakat untuk melakukan aksi protes lebih besar lagi. Kaum muda menjadi pelopor pada aksi ini.

Seperti halnya di negara-negara yang menerapkan sistem totalitarianisme lainnya, cara-cara yang digunakan untuk melanggengkan eksistensi kekuasaan juga menggunakan pendekatan militeristik. Ben Ali juga memaksimalkan kekuatan militernya - dalam hal ini pihak kepolisian - di dalam usaha untuk meredam kerusuhan yang terjadi di Tunisia. Sebenarnya pemerintah Tunisia mencoba mengambil hati masyarakat Tunisia dengan cara memecat menteri dalam negeri yang terindikasi terlibat dalam kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian Tunisia. Akan tetapi, ternyata upaya tersebut gagal. Karena memang, masih banyak hal lain yang juga sama fundamentalnya yang gagal dipenuhi oleh Ben Ali kepada rakyat Tunisia.

Setelah jatuhnya pemerintahan Ben Ali, kekayaan yang disembunyikan oleh Ben Ali, berhasil diungkap. Ben Ali ternyata menyembunyikan permata, berlian dan uang kontan di beberapa tempat rahasia di sekitar istananya. Kekayaan yang dimiliki oleh Ben Ali akan dibagi-bagikan kepada masyarakat Tunisia. Hal ini dilakukan, mengingat, maraknya tindak korupsi pada saat Ben Ali berkuasa.<sup>8</sup> Akhirnya, pada tanggal 13 Januari 2011, pemerintahan Ben Ali resmi berakhir.

Tumbangnya diktator Ben Ali di Tunisia, memberikan inspirasi kepada rakyat Mesir untuk melakukan hal serupa dengan mengobarkan semangat revolusi. Revolusi yang dikobarkan oleh rakyat Mesir mengakibatkan mundurnya Hosni Mubarak dari jabatannya sebagai presiden Mesir pada tanggal 11 Februari 2011.<sup>9</sup>

Keberhasilan rakyat Mesir dalam menjatuhkan diktatornya bukanlah hal mudah. Pemerintahan Hosni Mubarak dalam menghadapi gelombang protes dari rakyatnya menggunakan pendekatan militeristik. Setelah Hosni Mubarak memberlakukan kebijakan jam malam dan larangan untuk berpergian pada saat malam hari, pemerintahan Mubarak menangkap orang-orang yang melanggar

---

<sup>8</sup> Dikutip dari Media elektronik harian Kompas. Beritanya sendiri dirilis pada 20 Februari 2011

<sup>9</sup> Informasi mengenai Turunnya Hosni Mubarak dikabarkan oleh Kompas pada 11 Februari 2011

kebijakan ini. Pemerintah Mesir menerapkan kebijakan jam malam ini dari jam 18.00 hingga jam 07.00. Diberlakukan kebijakan jam malam ini, tentunya di tentang oleh rakyat Mesir. Aksi demontrasi tetap berjalan tanpa menghiraukan kebijakan jam malam tersebut. Pada tanggal 19 februari 2011, rakyat Mesir membakar gedung-gedung milik pemerintah, kantor gedung partai Nasional Demokratik, serta gedung-gedung milik pendukung pemerintah Mubarak.

Penangkapan yang dilakukan oleh pemerintah Mesir tidak menyurutkan semangat rakyat Mesir untuk meneruskan aksi demontrasi ini. Rakyat Mesir menjelang pembatasan jam malam, tetap meneruskan aksi demontrasi mereka dan memberi respon negatif atas penunjukan Omar Sulaiman sebagai presiden Mesir untuk menggantikan Husni Mubarak.

Aksi brutal lainnya yang dilakukan oleh pemerintahan Mubarak terlihat pada saat menangani aksi protes rakyat Mesir. Pemerintah Mesir bukan hanya menggunakan gas air mata dan meriam air, tetapi parahnya, mereka juga menabrakan kendaraan militer ke arah kerumunan massa.<sup>10</sup>

Kekerasan yang di lakukan oleh militer Mesir tidak berhenti disitu saja, tetapi pada saat terjadi demonstrasi pada tanggal 26 februari 2011, tentara Mesir juga memukuli para demontran. Bukan hanya dipukuli oleh pihak militer Mesir, akan tetapi para demontran ini juga ditangkap oleh militer Mesir.

Pemerintah Mesir di dalam menanggapi aksi demontrasi ini, dengan tegas tidak akan membiarkan gerakan-gerakan provokatif, parade, pertemuan dan aksi demontrasi. Pemerintah Mesir akan menanggapi aksi demonstrasi tersebut dengan tegas. Para pemrotes yang ditangkap akan diproses secara hukum dan diserahkan kepada pihak berwajib.

Setelah jatuhnya pemerintahan diktaktor di Tunisia dan Mesir, gerakan serupa juga terjadi di negara Libya. Rakyat Libya berusaha menjatuhkan penguasa diktaktor Moammar Khadafy. Rakyat Libya melakukan aksi protes hingga pada tanggal 22 februari 2011 gerakan anti-pemerintah berhasil menguasai sebagian wilayah Tripoli

---

<sup>10</sup> Aksi brutal yang dilakukan oleh Husni Mubarak diberitakan oleh Tempointeraktif pada 29 Januari 2011

Sebuah pernyataan diktaktor disampaikan oleh Khadafy, saat menangani aksi protes rakyat Libya. Khadafy mengatakan bahwa nasib negaranya berada ditangannya. Pernyataan yang disampaikan oleh Khadafy ini memberi kesan sangat diktaktor. Kegilaan selanjutnya yang dilakukan oleh Khadafy adalah ketika menggunakan helikopter dan penembak jitu dalam menghalau aksi pendemo anti pemerintah. Tuntutan para pendemo itu, meminta Khadafy untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Libya yang telah berkuasa selama 41 tahun.<sup>11</sup>

### **2.3 Totalitarianisme menurut pandangan Hannah Arendt**

Totalitarianisme merupakan sebuah fenomena yang menakutkan jika diterapkan di sebuah negara. Pendapat ini dapat dibenarkan ketika melihat fakta historisnya. Seorang filsuf yang pernah mengalami dan menjadi saksi diberlakukannya totalitarianisme sebagai sebuah sistem politik adalah Hannah Arendt, menegaskan ciri-cirinya. Dia secara tegas membedakan totalitarianisme dengan sistem politik sejenisnya. Menurut Hannah Arendt totalitarianisme bukanlah sekedar peningkatan bentuk-bentuk pemerintahan opresif seperti despotisme, pemerintahan tiranik dan diktaktor, melainkan sesuatu yang secara hakiki baru.<sup>12</sup>

Jika melihat dalam perspektif sistem nilai, bagi Arendt sistem nilai yang digunakan oleh rezim totalitarianisme adalah sebuah sistem yang memang benar-benar baru. Rezim totalitarianisme bukan hanya sering melanggar hak-hak asasi manusia dan melakukan penindasan yang brutal, bahkan tanpa perasaan malu melakukan tindakan yang dianggap jahat. Mereka sering merampas hak milik, menfitnah, membunuh, menyangkal hak hidup lawan.

Sebagai sebuah sistem politik dan ideologi, tentunya totalitarianisme harus memiliki hal-hal yang mampu menunjang agar sistem ini dapat berjalan. Sistem totalitarianisme berusaha untuk mengaburkan dan memberangus kelas-kelas yang ada di dalam masyarakat. Kelas-kelas ini dihapus dan diganti menjadi gerakan-gerakan

---

<sup>11</sup> Aksi protes opisisi terhadap pemerintahan Khadafi diinformasikan tempointeraktif pada 18 februari 2011

<sup>12</sup> Lihat kata pengantar Franz Magnis Suseno dalam buku terjemahan Asal Usul Totalitarisme jilid III.

massa. Arendt menggunakan kata *mob* untuk menggambarkan gerakan-gerakan politik ini. Jika dibahas Indonesia kan kata *mob* ini bukan hanya memiliki arti kerumunan massa, tetapi juga memiliki arti gerombolan penjahat, kaum preman atau bajingan.<sup>13</sup>

Hannah Arendt mendefinisikan *Masses* sebagai suatu kumpulan yang tinggal bersama. Namun, mereka berkumpul bukan karena diikat oleh sebuah kesadaran akan kepentingan bersama. Sebab, mereka tidak memiliki spesifikasi kelas yang jelas. Oleh karena itu mereka berkumpul karena dibatasi dan di determinasi oleh penguasa demi tujuan penguasa itu sendiri. Pengertian kata *masses* ini dapat kita lihat dari kesimpulan sebagai berikut :

*“It turned out they were both mistaken. The Mob, the underworld of the bourgeois class, hoped that the helpless masses would help them into power, would support them when they attempted to forward their private interests, that they would be able simply to replace to older strata of bourgeois society and to instill into it the more enterprising spirit of the underworld.”* (“Ternyata mereka berdua salah. *Mob*, dunia bawah tanah kelas borjuis, berharap bahwa *massa* akan membantu mereka yang tak berdaya agar menghimpun kekuatan, akan mendukung mereka ketika mereka berusaha untuk meneruskan kepentingan pribadi mereka, bahwa mereka akan bisa hanya untuk mengganti ke strata yang lebih tua masyarakat borjuis dan untuk menanamkan ke dalamnya semangat berusaha lebih dari dunia yang ada di bawah mereka.”) (Arendt, 1976, 332)

Arendt juga memberikan penjelasan mengenai kata *mob*. *Mob* adalah sebuah kumpulan masyarakat yang mengalami eliminasi dari negara. Mereka berada dalam kelas sosial yang sangat rendah. Mereka adalah kumpulan buruh, pekerja kasar dan orang-orang buangan juga mengalami eksploitasi oleh Borjuis. (Arendt, 1976, 337).

Walaupun Hannah Arendt membedakan *masses* dan *mob*, akan tetapi keduanya memiliki satu persamaan. *Masses* dan *mob* sama-sama berada di luar semua ramifikasi sosial dan perwakilan politik yang normal. *Masses* tidak mewarisi standar serta sikap-sikap kelas dominan seperti *mob*, tetapi mencerminkan dan sedikit banyak menyelewengkan standar dan sikap terhadap urusan publik semua kelas. (Arendt, 1995, 15).

---

<sup>13</sup> Hannah Arendt sendiri membedakan *masses* dan *mob*.

Kehebatan rezim totalitarianisme di dalam melanggengkan kekuasaan, terlihat dari kepiawaian mereka dalam melakukan kamuflase. Hal ini terlihat ketika sistem kelas mengalami kehancuran. Jika kelas mengalami kehancuran maka berarti secara otomatis hancur juga sistem partai., terutama partai-partai yang mewakili seluruh kepentingan kelas.

Gerakan-gerakan massa ini akan tumbuh subur di negara-negara yang anggota masyarakatnya terbagi-bagi dan mengalami atomisasi. Gerakan massa yang timbul dari kondisi seperti ini memiliki ciri tidak brutal dan bukan masyarakat yang memiliki keterbelakangan, tetapi justru kondisi masyarakatnya terisolasi dan kurang dapat menjalin relasi sosial yang normal.

Gerakan-gerakan massa berubah menjadi gerakan totaliter. Perubahan ini dapat terjadi dengan cara para pemimpin gerakan ini memberikan tuntutan kepada anggotanya untuk memiliki kesetiaan total, tak terbatas dan tak dapat diubah oleh anggota-anggotanya. Loyalitas yang dimiliki oleh anggota-anggota gerakan ini merupakan suatu keharusan. Apabila di dalam pembentukan loyalitas anggota-anggota tidak menggunakan cara-cara totaliter, maka mau tidak mau menggunakan faktor psikologis untuk menciptakan dominasi total kepada para anggotanya.

Supaya cara-cara tersebut dapat berjalan dengan baik dan tanpa mendapat gangguan, maka loyalitas total yang harus di miliki anggota-anggotanya menjadi harga mati. Loyalitas total ini hanya memungkinkan bila kesetiaan dikosongkan dari semua substansi konkret yang memungkinkan munculnya perubahan-perubahan pendapat.( Arendt,1995, 31).

Dalam usaha untuk mendukung gerakan masyarakat tanpa kelas ala pemerintahan rezim totaliter, mereka menjadikan propaganda sebagai cara yang terbaik untuk menopang gerakan ini. Propaganda yang dilancarkan oleh rezim totaliter adalah usaha untuk mereduksi individualisme, sehingga nilai-nilai individualisme dapat larut dan lebur ke dalam bentuk masyarakat komunal. Slogan-slogan yang mendukung hal ini antara lain, seperti yang diakui oleh Bakunin.

Bakunin mengatakan bahwa “Aku tidak ingin menjadi aku, aku ingin menjadi kami.”<sup>14</sup> Pernyataan bakunin ini dikutip oleh Arendt dalam bukunya yakni :

“No single element in this general intellectual climate in postwar Europe was very new. Bakunin had already confessed, “ I do not want to be I , I want to be We,” (“Tidak ada elemen sendiri pada iklim intelektual setelah perang di Eropa. Bakun sudah mengakui, “ Aku tidak mau menjadi aku, Aku ingin menjadi kami). ( Arendt, 1976, 330)

Tentunya di dalam usaha untuk menjadikan masyarakat tanpa kelas ini, mau tidak mau meleburkan kaum borjuis dengan kaum *mob*. Aliansi antara borjuis dan kaum *mob* merupakan harga mati. Jika usaha untuk meleburkan antara kedua unsur ini gagal, maka dapat dipastikan bahwa cita-cita rezim totalitarianisme untuk membentuk masyarakat tanpa kelas akan mustahil terwujud.

Di dalam masyarakat bukan hanya ada unsur borjuis dan *mob* saja, tetapi juga ada golongan massa.<sup>15</sup> Dalam gerakan masyarakat tanpa kelas ini, hanya golongan borjuis dan *mob* saja yang memiliki ketertarikan tanpa harus pemerintahan rezim totalitarianisme melakukan propaganda. Sedangkan golongan massa harus diikat dengan melakukan propaganda terlebih dahulu. Oleh karena itu, propaganda totaliter merupakan suatu keharusan untuk menopang gerakan totalitarianisme.

Bukan hanya propaganda, tetapi juga teror. Kedua hal ini merupakan pilar untuk menyokong keberhasilan gerakan totalitarianisme. Bahkan banyak yang memberikan pendapat bahwa antara propaganda dan teror adalah dua sisi dari mata uang yang sama.<sup>16</sup> Namun, pada tahap selanjutnya propaganda akan mengalami evolusi menjadi indoktrinasi. Tidak peduli doktrin-doktrin yang diberikan adalah sebuah kebohongan yang mematikan nalar publik. Bahkan tidak segan-segan

---

<sup>14</sup> Pernyataan yang disampaikan oleh bakunin kembali menegaskan semangat komunis. Bakunin mengganti kata aku menjadi kata kami. Pernyataan Bakunin dicatat oleh Max Nomad *Apostles of Revolution*, Boston, 1939, h. 180. dikutip kembali dalam karya Hannah Arendt *The Origins of Totalitarianism*. h. 330

<sup>15</sup> Ingat perbedaan definisi yang dilakukan oleh Hannah Arendt mengenai kata *masses* dan *mob*.

<sup>16</sup> Ada 4 metode yang mampu menunjang kesuksesan kolaborasi propaganda dengan teror. Metode tersebut adalah metode pengumpulan informasi, metode penahanan kolektif, metode intimidasi dan metode eliminasi. Lihat *Dictatorship and Political Police : the technique of control by fear*. Karya ini dikerjakan secara bersama oleh Kegan Paul, Trench dan Truber yang diterbitkan tahun 1945 halaman 140

melakukan aksi pembersihan yang mendukung untuk melestarikan kebohongan tersebut. Salah satu contoh propaganda yang dilakukan oleh Stalin adalah memusnahkan buku-buku dan berkas-berkas lama serta pengarang beserta pembaca-pembacanya. Di tempat lain, Hitler menggunakan propaganda antisemitisme sebagai alat kontrol secara ketat terhadap rakyat ( Arendt, 1995, 60).

Setelah penguasa berhasil menggunakan propaganda dan teror, maka masyarakat dapat dikuasai oleh rezim totalitarianisme. Totalitarianisme yang berkuasa menggunakan administrasi dan perangkat negara memiliki tujuan jangka panjang untuk melakukan penaklukan dunia dan mengatur cabang-cabang gerakan.<sup>17</sup> Penggunaan polisi rahasia dan pembangunan kamp-kamp konsentrasi menjadi bukti atas terciptanya sebuah negara totalitarianisme. Efisiensi administrasi merupakan sebuah langkah yang brilian yang dilakukan oleh rezim totaliter. Dengan efisiensi ini, maka ketidakjelasan struktur yang merupakan konsekuensinya adalah alat paling ideal untuk melaksanakan apa yang disebut prinsip Sang Pemimpin. ( Arendt : 1995 : 161).

### **2.3.1 Mengapa Totalitarianisme dapat terjadi dan apa dampaknya bagi politik.**

Hannah Arendt memberikan penekanan dan menitikberatkan kepada masalah rasisme dan imperialisme sebagai suksesnya dari terciptanya sebuah sistem pemerintahan totalitarianisme. Mengenai rasisme ini biasanya digunakan oleh rezim totaliter dalam bentuk propaganda. Propaganda rasisme sendiri secara terang-terangan digunakan oleh Hitler dengan cara menyebarkan propaganda antisemitisme.

Propaganda antisemitisme sendiri terjadi bukannya timbul tanpa sebab. Orang-orang Yahudi pada waktu itu memiliki keistimewaan dari negara. Keistimewaan ini mereka peroleh sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang mereka berikan. Keistimewaan yang diperoleh orang Yahudi adalah mereka mendapatkan hak kesederajatan.

Hak-hak yang diperoleh orang-orang Yahudi lambat laun memyulutkan kebencian. Banyak orang-orang yang iri kepada keistimewaan orang Yahudi berbalik

---

<sup>17</sup> Salah satu caranya dengan mendirikan polisi rahasia dan juga pada akhirnya mendirikan kamp-kamp konsentrasi.

membentuk gerakan antisemitisme. Bukan sekedar membentuk gerakan antisemitisme tetapi juga membentuk partai-partai yang secara terang-terangan menjadikan antisemitisme sebagai perjuangan partai. Bahkan, walaupun partai-partai ini merupakan partai kecil, akan tetapi mereka menjadi pelopor organisasi antisemitisme secara internasional.

Lebih jauh lagi, gerakan antisemitisme ini juga membawa semangat Marxisme. Gerakan antisemitisme kiri ini timbul dikarenakan kebencian orang-orang kecil, baik para pengusaha kecil dan pekerja yang seolah-olah menerima bantuan keuangan padahal bantuan tersebut menghisap kehidupan mereka. Para bankir Yahudi mengeksploitasi mereka dengan memberi bunga yang besar bagi mereka yang meminjam uang untuk dijadikan modal usahanya.

Gerakan antisemitisme ini, mendapat dukungan argumentasi historis dari seorang pemikir Prancis yang bernama Louis Ferdinand Celine. Dia mengatakan bahwa orang-orang Yahudi telah menghalang-halangi evolusi Eropa kearah sebuah kesatuan politik, yang menyebabkan pecahnya semua peperangan di Eropa sejak tahun 843 dan menjadi dalang keruntuhan Prancis maupun Jerman dengan menghasut mereka untuk saling membenci ( Arendt, 1995, 76 ).

Gerakan-gerakan antisemitisme ini membuahkan hasil, jasa pelayanan Bankir orang-orang Yahudi kepada negara mengalami penurunan. Konsekuensi dari hal ini, mereka terpaksa mengalami pergeseran-pergeseran dalam jenis-jenis pekerjaan orang-orang Yahudi. Awalnya, orang-orang Yahudi yang memberikan jasa pelayanan keuangan kepada negara beralih profesi menjalankan bisnis independen. Selain itu, masalah Yahudi dalam segi sosial, berkembang menjadi katalisator kebencian. Hal inilah yang membangkitkan masyarakat untuk mengusung kembali wacana pembantaian orang-orang Yahudi.

Imperialisme juga merupakan salah satu faktor suksesnya pemerintahan totalitarianisme. Sebenarnya ide awal melakukan imperialisme disebabkan oleh kelebihan produksi kapital di negara masing-negara masing. Namun lambat laun ketika ekspansi ekonomi yang dilakukan oleh para kapitalis berbuah hasil, ternyata untuk mendukung ekspansi ini, membutuhkan jaminan politik oleh negara

mereka masing-masing. Tidak heran, jika ekspansi ekonomi dan ekspor kekuasaan menjadi sebuah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ekspansi ekonomi yang dilakukan oleh para kapitalis membutuhkan proteksi agar modal mereka aman. Munculnya ekspor kekuasaan merupakan implementasi dari proteksi tersebut.

Di latari oleh hal ini, ekspansi yang dilakukan para kapitalis di era imperialisme dalam melakukan ekspansi ekonomi diambil alih oleh negarawan. Sebelumnya ekspansi ekonomi murni merupakan lahan bagi kapitalisme. Namun lambat laun, urusan ekonomi dan negara dicampuradukan. Kepentingan melakukan ekspansi ekonomi awalnya murni hanya untuk kepentingan kapitalis semata, namun pandangan tersebut digeser dengan menjadikan negara sebagai dasar untuk memenuhi kepentingan imperialisme tersebut.

Dalam era imperialisme, sebuah filsafat kekuasaan telah berubah menjadi filsafat kaum elite, yang dengan cepat mengerti dan siap untuk mengakui bahwa haus akan kekuasaan hanya dapat dipuaskan oleh penghancuran. Para imperialis ini, kerap berpikir menggunakan logika Hobbes. Pandangan mengenai imperialis ini terlihat melalui uraian yang ada di bawah ini :

*"There is hardly a single bourgeois moral standart which has not been anticipated by unequaled magnificence of Hobbes's logic. He gives an almost complete picture, not of man but of the bourgeois man, an analysis which in three hundred years has neither been outdated nor exelled."* (Hampir tak ada standar moral tunggalkaum borjuis yang tidak di antisipasi logika Hobbes. Dia memberi hampir gambaran utuh, bukan manusia biasa, tetapi manusia yang borjuis. Sebuah analisa yang tidak menjadi usang atau kadaluarsa dalam 300 tahun..")(Arendt, 1976, 139).

Pandangan ini menjadi sangat masuk akal, dengan melihat definisi yang diberikan oleh Hobbes. Hobbes mengatakan bahwa manusia memiliki kondisi alamiah berupa perang abadi semua melawan semua. Dalam pandangan Hobbes tersebut, bukan lagi antar individu yang mengalami konflik, tetapi pada tahap yang lebih tinggi lagi berubah menjadi perseteruan komunal. Sehingga mudah saja membayangkan akibat dari imperialisme yang dilakukan oleh negara asal kapitalis ini, negara jajahan memberikan reaksi dan melawan negara penjajah tersebut.

Setelah mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menimbulkan totalitarisme, maka pertanyaan selanjutnya adalah apa dampaknya bagi politik? Jika memahami doktrin totalitarisme fasisme, maka dengan jelas bahwa politik tidak akan berkembang. Hal ini terjadi karena totalitarisme pada fasisme memiliki pandangan bahwa mereka tidak percaya akan pertimbangan akal, penyangkalan terhadap persamaan manusia pada dasarnya, kode tingkah-laku berdasarkan dusta dan kekerasan serta pemerintahan oleh golongan terpilih. (Ebenstein, 131) Politik tidak akan berkembang karena pemerintahan totalitarisme menutup ruang-ruang demokrasi. Mereka melihat bahwa demokrasi jika diberikan ruang maka akan mengganggu stabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, semua unsur-unsur oposisi harus dihapuskan. Argumen lainnya yang mendukung matinya demokrasi adalah bahwa prinsip irasionalitas oleh rezim totalitarisme dijadikan sebagai pembatas sarana latihan nalar yang memungkinkan terjadinya dinamisasi kekuasaan.

## **IKHTISAR**

Totalitarisme dapat ditinjau dari segi etimologis, historis dan artikulatif. Secara etimologis kata totalitarisme berasal dari kata *totalitario*. Kata *totalitario* ini diperkenalkan dan dipopulerkan pada masa kekuasaan Benito Mussolini di Italia. Mussolini sendiri memberikan keterangan mengenai kata *totalitario* ini yakni, Semua berada di bawah kendali negara. Tidak ada hal apapun yang ada di luar negara. Tidak ada yang boleh melawan negara. “*All within the state, none outside the state, none against the state.*” (The New Encyclopaedia Britannica, 1903, 863). Totalitarisme sendiri bukan hanya tumbuh subur di negara-negara yang menganut ideologi fasisme dan komunisme, seperti Jerman dan Uni Soviet, tetapi juga di negara-negara yang menjadikan agama sebagai basis ideologi mereka. Negara-negara tersebut misalnya Mesir, Tunisia dan Libya.

Uni Soviet menjadikan komunisme sebagai landasan ideologi mereka, namun menjalankan sistem totalitarisme dengan menerapkan kebijakan monopartai. Selain kebijakan monopartai, Stalin – yang merupakan penguasa Uni Soviet – mendirikan kamp-kamp konsentrasi yang terkenal dengan nama Gulag. Kamp-kamp

konsentrasi ini digunakan bagi mereka yang terindikasi melakukan subversif terhadap negara. Gulag ini menjadi lambang kekejaman pemerintahan totalitarianisme Stalin.

Selain Uni Soviet, Jerman pada Perang Dunia II juga menerapkan sistem totalitarianisme sebagai gaya pemerintahannya. Tidak jauh berbeda dengan Uni Soviet, Jerman juga membangun kamp-kamp konsentrasi. Mungkin yang menjadi perbedaannya adalah kamp-kamp ini menjadi simbol kebencian Nazi kepada orang-orang Yahudi. Nazi menggunakan propaganda rasisme yakni antisemitisme untuk menyingkirkan orang-orang Yahudi ke kamp-kamp konsentrasi. Hitler – yang berkuasa berkat Nazi- juga mempergunakan pasukan SS sebagai sarana kontrol sosial. Pasukan SS disebarkan untuk memata-matai rakyat agar rakyat Jerman tidak melakukan penyimpangan terhadap pemerintahan.

Secara historis, diskursus mengenai totalitarianisme biasanya mengacu kepada pemerintahan totalitarianisme di Jerman dan Rusia, namun pergolakan yang terjadi di Tunisia, Mesir, Libya serta beberapa negara di kawasan Timur Tengah di era kontemporer juga menarik untuk dijadikan bahan acuan. Pergolakan tersebut menjadi sinyal penting bahwa totalitarianisme masih ada dan kapan saja mengancam koeksistensi manusia. Beruntung, tergulingnya pemerintahan diktator di Tunisia dan Mesir, menjadi inspirasi bagi masyarakat dimana mereka masih menghadapi kelaliman pemerintahan totalitarianisme.

Hannah Arendt sebagai seorang pemikir juga memberikan perhatian khusus terhadap totalitarianisme. Bagi dia, totalitarianisme merupakan sistem politik yang benar-benar baru, yang secara hakiki berbeda dengan sistem pemerintah buruk lainnya, seperti tirani, diktator dan despotisme. Hannah Arendt juga memberikan penjelasan mengapa sampai dapat terjadi pemerintahan totalitarianisme. Menurut dia, totalitarianisme dapat terjadi melalui propaganda rasisme dan juga imperialisme yang dilakukan pemerintah. Propaganda rasisme yang menjadi perhatian Arendt adalah propaganda antisemitisme. Di beberapa negara yang menganut totalitarianisme sebagai gaya hidupnya menjadi antisemitisme sebagai alat untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat yang membuat eksistensi kekuasaan pemerintah dapat bertahan.

Hannah Arendt juga melihat kekuasaan *masses* yang berubah menjadi *mob* menjadi alat kekuatan yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya. Arendt sendiri secara tegas membedakan *masses* dengan *mob*. *Mob* sendiri dapat berarti gerombolan penjahat, kumpulan orang-orang brengsek dan orang-orang yang terbuang.

Selain propaganda rasisme, Arendt juga menjelaskan imperialisme sebagai salah satu pendukung pemerintahan totalitarianisme. Imperialisme digunakan sebagai alat untuk menunjang keuangan negara yang habis digunakan untuk membiayai pemeliharaan eksistensi pemerintahan. Salah satunya digunakan untuk membiayai pasukan SS dan percobaan senjata yang dilakukan di kamp-kamp konsentrasi dengan menjadikan orang-orang Yahudi sebagai target utama.

Imperialisme juga dijadikan sebagai jalan keluar terhadap kebuntuan ekonomi di negara asal. Ketika kalangan kapitalisme mengalami kebuntuan, mereka bekerja sama dengan pemerintah untuk mencari jalan keluar. Para kapitalis, membutuhkan jaminan keamanan dari pemerintah atas ekspansi ekonomi yang mereka lakukan. Oleh karena itu, propaganda rasisme dan semangat imperialisme berkaitan dengan suksesi pemerintahan totalitarianisme.

Lantas , apa dampaknya bagi politik? Politik tidak akan berkembang dan lambat laun akan mati, karena totalitarianisme mengunci semua aspek kehidupan, dalam hal ini aspek kebebasan dan berpartisipasi diberangus untuk kepentingan penguasa.

## **BAB 3**

### **Pola kuasa dalam demokrasi dalam pandangan Lefort**

Telah disinggung pada bab sebelumnya bahwa problem politik totalitarianisme bukan hanya dapat dilihat dari satu sudut pandang semata, tetapi dapat pula dikaji secara lebih serius dengan meninjau totalitarianisme dari berbagai perspektif. Pada bab 2 tersebut perspektif yang digunakan antara lain, etimologis, historis dan artikulatif filosofis.

Pada bab ketiga ini, akan dipaparkan secara serius pemikiran filsafat politik Lefort. Masalah yang akan dikaji pada bab ini, mengenai perbedaan secara tegas antara pola kuasa lama dan baru. Claude Lefort adalah seorang pemikir filsafat politik yang berasal dari Prancis. Tidak bisa dipungkiri pemikirannya sangat terpengaruh dari Marleau Ponty. Ponty ini merupakan guru bagi Lefort. Lefort sendiri pernah menyunting karya gurunya tersebut. Mengetahui pola kuasa ini, menjadi sangat penting diketahui untuk menunjukkan kelemahan totalitarianisme. Setelah mengetahui masalah yang ditimbulkan pada pola kuasa lama, maka melihat perbandingan antara politik demokrasi dan politik totalitarianisme menjadi langkah selanjutnya yang diperlukan untuk memperkokoh fondasi untuk mengkritik sistem totalitarianisme. Sebagai langkah terakhir, pada bab ini ditutup dengan pembahasan mengenai konsep Lefort yang terkenal yakni demokrasi sebagai ruang kosong. Pemikiran dia ini menjadi pisau analisis untuk mengkritik sistem politik totalitarianisme yang memiliki kecenderungan mematikan dinamika politik itu sendiri.

#### **3.1 Perbedaan Pola Kuasa Lama dengan Kuasa Baru menurut Claude Lefort.**

##### **3.1.1 Pola Kuasa Lama**

Pola kuasa lama mudah kita temukan pada model di luar demokrasi. Sebagai contoh pola kuasa lama ini dapat kita lihat di negara yang menerapkan model monarki dan fasisme. Negara-negara tersebut antara lain Prancis dan Inggris. Prancis pernah menerapkan sistem monarki. Pemerintahan monarki Prancis sudah ada

sebelum terjadinya revolusi Prancis tahun 1789. Sejak itu, Prancis mengganti sistem pemerintahannya menjadi presidensial. Sedangkan di pihak lain, Jerman, Jepang<sup>18</sup>, Italia, Rusia mewakili dari kubu fasisme. Negara-negara tersebut menerapkan sistem fasisme pada saat masa Perang Dunia II. Antara monarki dengan fasisme, sama-sama memiliki tendensi totalitarianisme.

Pada sistem monarki, terjadi ketidakadilan dalam hal kesetaraan untuk berpartisipasi memperebutkan kekuasaan<sup>19</sup>. Ketidakadilan ini terjadi dikarenakan ruang kuasa sebagai tempat untuk bertarung telah terisi penuh oleh penguasa dan kerabatnya. Posibilitas rakyat jelata untuk menjadi seorang penguasa jelas tertutup. Ketidakadilan yang diterima oleh rakyat jelata ini adalah ketidakadilan pra-kondisi. Maksudnya, peluang mereka untuk menjadi seorang raja tertutup karena mereka bukan termasuk golongan keluarga raja.

Negara monarki – sebagai contoh Inggris<sup>20</sup> dalam melakukan regenerasi kepemimpinan ini terjadi keeksklusifan karena didasari oleh garis keturunan. Yang memiliki kesempatan untuk menjadi raja hanya anak raja. Di luar itu, tidak ada kesempatan untuk dapat menjadi raja. Seorang anak petani tidak memiliki kesempatan yang sama dengan seorang anak raja untuk menjadi penguasa. Karena memang, posisi raja bukan ditentukan oleh partisipasi rakyat jelata, tetapi dari konsekuensi status yang diperoleh secara primordial. Rakyat jelata hanya dapat menjadi penonton regenerasi penguasa tanpa adanya sebuah kompetisi pertarungan kekuasaan. Inilah yang dimaksud ketidakadilan pra-kondisi.

Pada pola relasi lama, terdapat hierarki sosiologis di dalam masyarakat yang bersifat tertutup. Tidak dimungkinkan di dalam kondisi seperti itu terjadinya perpindahan status masyarakat. Seorang rakyat jelata tidak akan pernah menjadi raja karena memang kondisi secara struktur sosial, ini terjadi oleh karena diterapkannya

---

<sup>18</sup> Jepang selain menganut fasisme, juga menerapkan sistem kekaisaran.

<sup>19</sup> Kesetaraan politik ini biasa dikenal sebagai isonomia. Isonomia sendiri merupakan sebuah konsep politik filsafat Yunani. Isonomia adalah sebuah konsep kesetaraan dalam berpartisipasi warga negara dalam arena pertarungan kekuasaan. Lihat *The origins of Greek Thought*, Jean Pierre Vernant hal. 61. “... *The concept of isonomia- that is, the equal participation of all citizens in the exercise of power.*”

<sup>20</sup> Inggris hingga saat ini masih menjalankan sistem monarki.

monarki sebagai model dari pemerintahannya. Sekali lagi, ketidakadilan juga terjadi dalam perspektif sosiologis.

Pada negara monarki, pemerintahan tertinggi dikendalikan oleh seorang raja. Seorang raja kerap kali melakukan tindakan arbiter, despotik, dan menyengsarakan rakyat. Hal ini tidak mengherankan karena seorang raja memiliki banyak keistimewaan. Salah satu keistimewaan seorang raja adalah pengkultusan terhadap dirinya. Raja dianggap sebagai seorang wakil Tuhan. Oleh karena itu, setiap perbuatan seorang raja tidak diperkenankan untuk di interupsi. Perkataan dan perbuatan seorang raja di anggap sebagai undang-undang. Keistimewaan tersebut merupakan hasil dikembangkannya sebuah matrik politikal teologi. Seperti terlihat lewat pernyataan Lefort sebagai berikut :

*“It is in effect within the framework of monarchy, or that of the particular type of monarchy which, originally developed in a theologico-political matrix, gave the prince sovereign power within the boundaries of a territory and made him both a secular agency and a representative of God, that the features of state and society were first outlined, and that the first separation of state and civil society occurred.”* (“Hal ini merupakan efek dari diberlakukannya model kerangka monarki, atau jenis monarki tertentu yang awalnya dikembangkan dalam matriks politik teologikal, yang memberi pangeran kekuasaan yang berdaulat dalam batas-batas wilayah dan membuatnya sekaligus menjadi agen sekuler dan wakil Allah, dari sinilah keistimewaan dari negara dan masyarakat pertama kali diuraikan, dan pemisahan pertama antara negara dan masyarakat sipil terjadi.”)

Ketidakterbantahan kedaulatan yang dimiliki oleh raja merupakan hasil matrik politikal teologi tersebut. Seorang raja selalu akan berkuasa sampai dia mati karena dilindungi oleh sistem tersebut. Menjadi seorang raja adalah sebuah anugerah yang dimiliki oleh segelintir orang saja. Hibah kekuasaan bersifat permanent, karena memang tidak ada mekanisme regenerasi kekuasaan yang berkala.

Menurut analisa Ernst Kantorowicz, tubuh seorang raja merepresentasikan pemaknaan ganda. Representasi pertama adalah bahwa seorang raja memiliki makna sebagai penjelmaan komunitas. Sedangkan representasi kedua adalah bahwa raja merupakan representasi tubuh Kristus. Konsep yang kedua ini merupakan hasil dari pengembangan dari zaman abad pertengahan. ( Lefort ,1986, 25)

Dalam model monarki, kekuasaan sudah dikandung secara fisik di dalam diri seorang raja. ( Lefort, 1988, 17). Selain melebur di dalam diri raja, kekuasaan yang dimiliki oleh raja dibuatkan seperangkat aturan secara permanen yang seolah-olah menjadi garansi eksistensi kekuasaan raja. Sehingga, seorang raja pada pola kuasa lama, memiliki keamanan kekuasaan yang tidak mendapat gangguan dari luar dirinya. Selain itu, seorang raja juga mendapatkan legitimasi kekuasaannya tanpa syarat-syarat yang bersifat duniawi karena sudah diperoleh melalui ikatan primordial, garis keturunan dan juga kerap dilindungi dari doktrin religius tertentu. Pandangan di atas dapat kita lihat dari pendapat Lefort sebagai berikut :

*“Power was embodied in the prince, and it therefore gave society a body. And because of this, a latent but effective knowledge of what “one” meant to “other” existed throughout the social.”* (“Kekuasaan melekat dalam tubuh sang pangeran, dan oleh karena itu, kekuasaan tersebut memberikan masyarakat sebuah tubuh. Dan karena hal ini, pengetahuan yang laten namun efektif dari apa yang "satu" yang berarti untuk "lainnya" hadir di seluruh sosial.”) ( Lefort, 1988,17 ).

Selain monarki, pada pola kuasa lama terdapat pula sistem politik lainnya, yakni fasisme dan komunisme. Model fasisme dan komunisme pada prinsipnya tidak begitu berbeda dengan model monarki. Pada model fasisme dan komunisme, kekuasaan dipegang oleh sekelompok orang yang bukan didasari oleh ikatan primordial tetapi lebih bersifat ikatan kelompok ideologis. Pada komunisme dan fasisme kekuasaan bukan melekat pada diri seorang raja, tetapi dalam kelompok elite. (Lefort, 1988, 13) Sebagai contoh komunisme Rusia. Peralihan tongkat estafet kepemimpinan berada di dalam satu koridor ideologi partai tertentu.

Pada fasisme dan komunisme, terjadi sebuah mutasi model politik. Pada sistem ini mulai bangkit kekuasaan totalitarianisme yang berasal dari partai. Partai Nazi Jerman dan Komunisme di Rusia sama-sama mengklaim bahwa mereka sama-sama mewakili aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Mereka juga memiliki kekuasaan untuk memberikan legitimasi atas semua hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Tidak mengherankan jika mereka berusaha untuk menghancurkan

kekuasaan oposisi yang memiliki potensi mengganggu stabilitas kekuasaan pemerintah. Model kekuasaan baru ini, memiliki karakteristik istimewa sehingga menciptakan sebuah bentuk sosial baru. Pada model ini terjadi kondensasi antara ruang kuasa, ruang hukum serta ruang pengetahuan. Pengetahuan menjadi tujuan akhir masyarakat dan norma berubah menjadi properti kekuasaan. Pernyataan Lefort ini terlihat jelas melalui uraian di bawah ini :

*“A condensation takes place between the sphere of power, the sphere of law and of knowledge. Knowledge of the ultimate goals of society and of the norms which regulate social practices becomes the property of power, and at the same time power itself claims to be the organ of discourse which articulates the real as such.”* (“Sebuah pemampatan terjadi antara ruang kekuasaan, ruang hukum dan pengetahuan. Pengetahuan mengenai tujuan utama lingkup masyarakat dan norma-norma yang mengatur praktek-praktek sosial menjadi milik kekuasaan, dan pada waktu yang sama kekuasaan itu mengklaim dirinya sendiri menjadi organ diskursus yang mengartikulasikan yang nyata sebagai mana adanya.”) ( Lefort : 1988 : 13 )

### **3.1.2 Pola Kuasa Baru**

Pola kuasa baru dapat kita lihat dalam model demokrasi. Kekuasaan tidak lagi menjadi monopoli satu kelompok ataupun ikatan primordial tertentu. Pola kuasa baru mengembalikan isonomia kepada seluruh warga negara. Seorang anak petani memiliki kesempatan untuk menjadi seorang penguasa. Asalkan, anak petani itu memiliki kemampuan untuk merebut kekuasaan tersebut. Secara demokratis, menjadi seorang penguasa bukan lagi dikarenakan hibah yang didasari oleh garis primordial ataupun ideologi kelompok yang sama, akan tetapi diperoleh melalui sebuah perjuangan. Sehingga ruang kuasa menjadi tempat untuk bertarung memperebutkan kekuasaan tertinggi. Semua keistimewaan yang melekat di dalam diri seorang raja luluh di dalam kompetisi untuk memperoleh kekuasaan.

Pada pola kuasa lama, ruang kuasa telah terisi penuh oleh dominasi keluarga raja. sedangkan pada pola kuasa baru,— dalam hal ini demokrasi- ruang kuasa berubah menjadi ruang kosong. ( Lefort : 1988 : 17 ). Aparatus tidak perlu lagi memikirkan segala urusan kelembagaan birokrasi. Yang terpenting disini adalah bahwa aparatus bertugas untuk mencegah agar pemerintah tidak melakukan kesewenang-wenangan

dengan mengambil alih kekuasaan serta memultakkan kekuasaan yang mereka peroleh. Pandangan mengenai aparatus ini terlihat dari kesimpulan mengenai pendapat Lefort sebagai berikut :

*“There is no dwell on the details of the institutional apparatus. The important point is that this apparatus prevents governments from appropriating power for their own ends, from incorporating it into themselves.”* (“Tidak ada yang mendiami bagian terkecil pada aparatus institusional. Poin pentingnya adalah bahwa aparatus ini akan mencegah pemerintah mengambil alih kekuasaan dari tujuan mereka sendiri, dari memasukkan kekuasaan ke dalam diri mereka sendiri.”) ( Lefort : 1988 : 17).

Ruang kuasa menjadi tempat untuk melakukan kompetisi sebagai sarana pendistribusian kekuasaan yang seimbang. Tidak lagi kekuasaan didistribusikan dengan dasar garis keturunan. Regenerasi kekuasaan dilakukan secara berkala. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya dominasi kekuasaan. Kekuasaan yang diperoleh seorang penguasa bukan lagi berdasarkan garis keturunan, tetapi melalui suara terbanyak dari masyarakat yang memiliki hak pilih. Semua warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Dalam model demokrasi ini, penguasa dituntut untuk memiliki kapabilitas mumpuni untuk menjalankan tugas pemerintahan yang bertujuan untuk menyejahterahkan seluruh rakyat.

Jika pada pola kuasa lama, ruang kuasa, ruang hukum dan ruang pengetahuan melebur padu di dalam diri seorang raja ataupun kelompok tertentu, pada model demokrasi mengalami penyebaran (disinkorporasi). Seorang penguasa tidak lagi menjadi standar untuk menentukan pengetahuan dan hukum berdasarkan pertimbangan rasional pribadinya. Akan tetapi, pengetahuan dan hukum terbentuk sepenuhnya melalui mekanisme publik.

Relasi yang ada pada demokrasi adalah bukan lagi tertutup seperti halnya pada pola kuasa lama. Pada demokrasi, relasi yang terbentuk untuk mencapai kekuasaan didasari oleh sebuah kompetisi dimana kompetisi tersebut dijadikan arena perebutan kuasa karena memang relasi tersebut dibangun di atas konflik di dalam masyarakat yang tidak terselesaikan. ( Lefort, 1988, 18 ) Demokrasi disini berfungsi

untuk mengatur dan menjaga agar konflik tetap berada pada jalurnya. Demokrasi bukan menjadi tujuan tetapi sebagai cara memperoleh tujuan.

Seperti yang kita tahu, pada pola kuasa lama, ruang kuasa telah terisi penuh oleh dominasi penguasa beserta keluarganya atau pada fasisme ruang kuasa telah terisi penuh oleh dominasi kelompok penguasa tertentu. Dominasi yang dilakukan oleh penguasa ini menjadi sebuah penanda kepastian yang menghegemoni dan menjaga agar kompetisi di dalam ruang kuasa tidak terjadi. Akan tetapi pada demokrasi, penanda kepastian yang mengisi ruang kuasa tersebut harus dihilangkan agar sebuah kompetisi untuk memperebutkan kekuasaan dimungkinkan terjadi.<sup>21</sup> Pendapat mengenai pembubaran penanda-penanda kepastian ini, dapat kita lihat dari penegasan Lefort di bawah ini :

*“In my view, the important point is that democracy is instituted and sustained by the dissolution of the markers of certainty.”* (“Dalam pandangan saya, poin pentingnya adalah bahwa demokrasi didirikan dan dipertahankan dengan cara membubarkan penanda-penanda kepastian.”) (Lefort:1988:19)

Jika pada pola kuasa lama, kekuatan rasional dimatikan, maka pada demokrasi pertimbangan rasional digunakan untuk memilih seorang pemimpin. Seorang pemimpin dituntut dapat mempengaruhi pemilihnya sehingga memperoleh mayoritas dukungan. Ruang pengetahuan sebagai tempat untuk mengembangkan pengetahuan diberikan apresiasi tinggi. Ruang pengetahuan ini merupakan tempat yang tepat untuk sarana pengembangan rasional guna memilih pemimpin yang terbaik. Tentunya hal ini tidak dapat ditemukan di dalam bentuk monarki ataupun segala bentuk totalitarianisme. konsensus yang tercapai sebagai hasil dari seleksi rasional bukanlah bersifat final. Di dalam demokrasi, legitimasi kekuasaan bukan dari doktrin agama maupun ideologi tertentu, tetapi berasal dari rakyat. Rakyat menjadi sumber legitimasi.

---

<sup>21</sup> Slogan terkenal Claude Lefort yakni, : *dissolution of the markers of certainty*. Lihat *democracy and political theory*. Hlm. 19

Tidak ada lagi legitimasi teologis yang melanggengkan kekuasaan raja. Seorang penguasa yang terpilih dalam mekanisme demokrasi mendapatkan legitimasi untuk berkuasa dari orang-orang yang memilihnya, bukan anugerah yang diberikan kepada seseorang berdasarkan garis keturunan seperti pada pola kuasa lama, sehingga, penguasa bertanggung jawab bukan lagi melulu kepada Tuhan, tetapi juga kepada rakyat jelata.

Di dalam masyarakat demokrasi, bagi Lefort perjuangan hak asasi manusia merupakan sebuah perjuangan untuk menjadikan prinsip ini menjadi sebuah prinsip general. Dalam pengertian ini, hak bukan menjadi eksis di dalam masyarakat demokrasi dalam bentuk hukum maupun institusi, tetapi keluar menjadi sebuah perjuangan yang berakar dari kesadaran akan hak itu sendiri. Mengenai perjuangan hak asasi manusia ini terlihat dengan jelas melalui kutipan di bawah ini :

*“Lefort sees the struggle for human rights as a “generative principle” of democratic society. By this he means that these rights do not “exist” in democratic societies in the form of specific laws and institutions; rather, they animate institutions and engender laws in so far as these institutions and laws are the outcome of struggles rooted in an awareness of rights.”* (“Lefort melihat perjuangan hak asasi manusia sebagai "prinsip generatif" masyarakat demokratis. Dengan ini, yang dia maksud adalah bahwa hak-hak tersebut tidak "ada" dalam masyarakat demokratis dalam bentuk undang-undang tertentu dan institusi, melainkan dengan menghidupkan lembaga dan hukum. Lahirnya lembaga-lembaga dan hukum itu adalah hasil dari perjuangan yang berakar pada kesadaran hak tersebut.”) ( Lefort : 1986 : 22-23).

Kesadaran akan hak general ini harus dimiliki oleh setiap individu. Kesadaran ini adalah bersifat tidak menentu di dalam perasaan. Hak itu sendiri di dalam dirinya bersifat tidak tetap. Materi dari hak itu sendiri berubah seiring berjalanya waktu. Jenis hak baru timbul dan bangkit untuk menjadi sebuah bentuk perjuangan yang baru.

## **3.2. Politik Totalitarianisme dan Politik Demokrasi**

### **3.2.1 Politik Totalitarianisme**

Politik totalitarianisme bukan sebuah sistem politik yang timbul dengan sendirinya tanpa ada latar belakang yang mendasari munculnya sistem ini. Lefort sendiri di dalam penelitiannya menjelaskan mengenai karakteristik totalitarianisme. Menurut Lefort karakteristik totalitarianisme adalah sebagai sebuah simbol struktur yang tidak muncul semua dalam satu waktu, tetapi muncul melalui rangkaian pengaruh secara gradual yang lebih berani dari sekedar pemikiran Marxisme. ( Flynn, 2005, 199 )

Sebuah pengkultusan kepada seorang pemimpin merupakan hal yang tidak bisa dihindari dalam politik totalitarianisme. Pengkultusan diri terhadap seorang pemimpin juga berkembang pada saat Stalin memimpin USSR. Cara-cara untuk mengkultuskan dirinya dilakukan oleh Stalin di dalam pekerjaannya., bahkan dia menanamkan sikap pengkultusan kepada dirinya melalui partainya sendiri. Dia menemukan caranya sendiri agar metode pengkultusan ini dapat benar-benar bekerja secara efektif.. Setelah pengkultusan diri berhasil dilakukan oleh Stalin, selanjutnya dia melakukan sebuah represi terhadap semua musuh dalam bentuk apapun. Biasanya cara-cara represi ini disebut sebagai teror ditaktorial ( Lefort, 1986, 61). Selain itu, Lenin dan Trotsky juga melakukan hal yang sama. Mereka melakukan represi terhadap semua lawan-lawannya, bahkan partai oposisi pun tidak diperkenankan terpelihara eksistensinya apalagi sampai terbentuk.

Totalitarianisme dalam pandangan Stalin memiliki kekhasan tersendiri. Stalin memasukan unsur-unsur militeristik sebagai anasir penting untuk menegakkan politik ini. Stalin juga melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh para pendahulunya, yakni dengan membagi secara tegas antara negara dan massa. Selain itu, Stalin juga mengkonsentrasikan segala otoritas di dalam model kekuasaan yang tunggal. Kekuasaan tunggal itu tentunya berada di dalam gengaman tangannya. Nilai-nilai yang telah ada secara *de facto* ini ditransformasikan oleh Stalin dengan mengambil kebijakan yang bernafaskan nilai sosialisme. ( Lefort, 1986, 64 )

Lefort membuat sebuah kritikan terhadap model totalitarianisme yang berkembang di USSR ini. Menurut dia, apa yang terjadi di USSR ini merupakan sebuah bentuk konsep negara kapitalisme. Mengapa demikian? Karena menurutnya,

politik birokrasi yang terjadi di USSR tidak jauh berbeda dengan model monopoli yang dilakukan di negara barat. Bahkan dia memberikan istilah sendiri bahwa model sosialisme yang diterapkan di USSR sebagai sebuah struktur absolutisme baru. Kritik Lefort ini dapat kita lihat secara komprehensif melalui uraian di bawah ini :

*“Lefort makes a critique of the conception of Soviet Union as a form of state capitalism. It had been argued by some that the concentration of capital in fewer and fewer hands was a worldwide phenomenon of “late capitalism” ; Using this interpretation, one could argue that the ruling strata of Soviet bureaucracy played a role analogous to the concentration of power I the monopolies of the western capitalist world.”* (“Lefort membuat kritik terhadap konsepsi Uni Soviet sebagai bentuk negara kapitalisme. Telah dibantah bahwa konsentrasi kapital lebih sedikit daripada orang yang menanganinya. Sebuah fenomena di seluruh dunia mengenai kapitalisme akhir. Dengan menggunakan interpretasi ini, dapat membantah bahwa strata pemerintahan birokrasi di Uni Soviet dimaikan sebagai sebuah peran analogi untuk menunjukkan konsentrasi kekuasaan yang dimonopoli oleh dunia kapitalis barat.”) ( Flynn : 2005 : 201).

Dipihak lain, Lefort juga setuju dengan pandangan Arendt mengenai penggunaan teror sebagai alat penjaga eksistensi politik totalitarianisme. Menurut Lefort, teror terbentuk dari kekuatan sosial baru, yang muncul dengan cara berusaha mencabut kekerasan dari arena masyarakat lama sehingga muncul masyarakat baru yang hidup dengan melakukan pengorbanan kepada kesatuan organisme yang baru terbentuk itu. Teror juga berasal dari pengembangan kelas proletariat. Teror tersebut merupakan respon dari situasi yang spesifik di dalam kelas pekerja itu sendiri. ( Lefort : 1987 : 69). Sehingga teror bukan lagi dilakukan dengan menggunakan kekuatan militer tetapi dengan kekuatan massa proletarian.

Seperti yang telah dijelaskan di Bab sebelumnya, bahwa totalitarianisme sudah berkembang pada ideologi fasisme dan komunisme. Akan tetapi, konsep totalitarianisme yang menjadi titik fokus penelitian Lefort, adalah totalitarianisme yang terjadi paska terjadinya perang dunia kedua. Pertarungan bukan lagi terjadi pada kubu sekutu dengan kubu fasisme. Tetapi konflik bergeser kepada pertarungan antara kekuatan barat dan kekuatan USSR. Ketegangan ini biasa disebut sebagai perang dingin. Akan tetapi, Lefort memberikan kritikan kepada pandangan mengenai

totalitarianisme ini. Bagi dia, totalitarianisme bukan sekedar perpindahan karakteristik komunisme yang berasal dari fasisme. Tetapi bagi dia, totalitarianisme adalah sebuah kategori politik baru yang telah terbentuk. Kata totalitarianisme mengalami transisi bentuk dari sebuah kata ejekan kepada mereka yang dianggap sebagai musuh-musuh negara menjadi sebuah kata yang diciptakan untuk menggambarkan sebuah tipe sosio-historis baru. Kata ini menunjukkan komunisme di USSR yang menunjukkan bahwa totalitarianisme ini merupakan ancaman bagi eksistensi demokrasi. ( Lefort, 1986, 274)

Masyarakat baru yang terbentuk di bawah kungkungan totalitarianisme adalah sebuah pemikiran yang menyangkal terjadinya sebuah relasi antagonisme kepentingan yang terjadi di dalam kelas atau grup. Di dalam totalitarianisme perbedaan yang dapat memicu perselisihan harus disingkirkan. Sebagai contoh pekerjaan yang dilakukan oleh insiyur, guru, pengacara dan dokter bukan mereka lakukan sebagai tanggung jawab pribadi terhadap profesinya, tetapi semua yang mereka lakukan semata-mata hanya untuk kepentingan politik pemegang otoritas. Berdasarkan hal ini, bahwa di dalam masyarakat yang dikungkung oleh totalitarianisme, gagasan mengenai masyarakat heterogenitas secara jelas ditolak. Karena gagasan tersebut dianggap dapat mengganggu keharmonisan di dalam masyarakat. ( Lefort, 1987, 265).

Selain menyangkal relasi antagonisme, politik totalitarianisme juga memiliki karakteritik utama yakni, politik ini menyembunyikan semua bentuk konflik antagonistik. Kondisi masyarakat yang beragam yang berpotensi menimbulkan konflik disingkirkan. Sebaliknya, kondisi masyarakat yang homogen dan bersifat transparan merupakan sebuah postulat bagi konsep totalitarianisme. Perbedaan pendapat yang terjadi di dalam masyarakat sangat dikutuk. Penyangkalan mengenai konflik yang merupakan karakteristik totalitarianisme dapat kita lihat dari kesimpulan Marchart seperti yang ada di bawah ini :

*“So the main feature of totalitarianism- with respect to the founding conflict- is that any form of antagonism will be concealed, and a homogenized and self-transparent society will be postulated : “ social division, in all its modes,*

*is denied, and at the same time all signs of differences of opinion, belief or mores are condemned*” (“Jadi, fitur utama totalitarianisme – dengan respek kepada pendasaran terhadap konflik – adalah bahwa bentuk apa saja dari antagonisme akan disembunyikan, dihomogenkan dan transparansi masyarakat dalam dirinya sendiri akan di postulatkan : “divisi sosial, dalam semua bentuk disangkal dan pada saat yang sama semua tanda yang menunjukkan perbedaan opini, kepercayaan dan kebiasaan dikutuk.”) (Marchart, 2007,102).

Proses identifikasi antara kekuasaan dan masyarakat, proses homogenisasi dalam ruang sosial, serta proses membatasi kekuasaan dan masyarakat, semua hal tersebut saling berhubungan dalam proses pembentukan sistem totalitarianisme. Melalui terbentuknya sistem ini, maka representasi sebuah keteraturan natural dibangun kembali. Tetapi keteraturan ini, diandaikan menjadi sebuah rasional sosial dan tidak memberikan toleransi baik kepada divisi-divisi maupun hierarkis. Proses identifikasi merupakan hasil elaborasi Lefort yang dituangkan dalam uraian di bawah ini :

*“With the constitution of this system the representation of a “natural” order is reestablished, but this order is supposed to be social-rational and does not tolerate apparent divisions and hierarchies.”* (“Dengan konstitusi dari sistem ini yang merupakan representasi sebuah perintah “natural” didirikan kembali, tetapi perintah ini diandaikan menjadi sebuah rasional sosial dan tidak toleransi nyata kepada divisi dan hirarki.”) (Lefort : 1987 ,286 ).

Perpindahan kekuasaan bukan lagi terjadi seperti pada pola kuasa lama, yang mana peralihan kekuasaan dilakukan berdasarkan garis keturunan, tetapi pada totalitarianisme yang berkembang setelah perang dunia kedua ini, di dasari oleh kesamaan ideologi. Penguasa tertinggi hanya berasal dari partai tertentu saja.<sup>22</sup> Dalam hal representasi penguasa, Lefort memberikan istilah *People-as-One*. Di dalam pengertian ini, masih belum sepenuhnya utuh. Pengertian *People* disini masih kabur dengan konsep proletarian. Kemudian selanjutnya kekaburan makna ini menjadi semacam mitos yang merupakan hasil konstruksi sosialisme. *People-as-One* hanya

---

<sup>22</sup> Dalam hal ini seorang penguasa di USSR hanya dapat berasal dari partai komunisme saja.

dapat direpresentasikan dan diakui hanya melalui sebuah kesepakatan dari *Great Other*. *People-as-One* ini selain merupakan representasi dari *Great-Other* juga merupakan representasi dari keterasingan *people* yang juga merupakan musuhnya sendiri.

Pandangan mengenai kondisi alamiah di dalam masyarakat yang bersifat penuh konflik disingkirkan di dalam model totalitarianisme. Tidak ada lagi realitas antagonisme di dalam masyarakat. Divisi original ini, berada di dalam tataran dimensi *ontological*. Akan tetapi divisi original ini tidak benar-benar dapat disingkirkan. Kemudian, divisi original ini berubah mengganggu dengan menyembunyikan *the imaginary*.

### **3.2.2 Politik Demokrasi**

Politik totalitarianisme merupakan ancaman serius bagi masyarakat modern. Dinamika sosio-politik masyarakat modern sangat minim terjadi akibat hegemoni sistem tersebut. Untuk memberi jalan keluar terhadap masalah ini, maka solusi terbaik adalah dengan menerapkan demokrasi sebagai sebuah sistem politik. Kondisi sosio-politik masyarakat modern merupakan dasar dari analisa pemikiran Lefort mengenai gagasannya mengenai demokrasi. Politik totalitarianisme dengan demokrasi memiliki logika yang berbeda antara yang satu dengan lainnya. Logika yang digunakan keduanya jelas berbeda.

Menurut Lefort, gagasan mengenai politik demokrasi adalah sebuah gagasan yang sangat kompleks. Pengertian mengenai konsep ini pada masa sekarang adalah bahwa sistem demokrasi berbicara mengenai penghargaan kepada orang yang berbeda dengan kita, orang lain memiliki kesetaraan politik yang sama dengan kita. Demokrasi juga berbicara mengenai suara mayoritas yang dianggap pemenang. ( Lefort : 1987 : 20 )

Gagasan demokrasi yang dilontarkan oleh Lefort bukanlah gagasan yang tidak memiliki landasan teori yang kuat. Lefort sendiri memiliki banyak pertimbangan untuk mendefinisikan demokrasi. Ada beberapa alasan yang mendasari gagasan demokrasi Lefort ini. Pertama, dia percaya bahwa bahwa para pemikir demokrasi

liberal pada abad kedelapan belas dan kedua puluh memberikan banyak pengalaman dan artikulasi nilai yang pada saat ini sangat berharga untuk diperiksa kembali dan dipertahankan. Para pemikir abad itu, memberikan jalan keluar bahwa politik totalitarianisme menghegemoni di segala aspek kehidupan masyarakat dengan gagasan mengenai demokrasi borjuis. Di dalam pandangan Lefort, bahwa konsep demokrasi itu bukanlah seperti itu. Lefort secara tegas menolak konsep para pemikir abad kedelapan belas dan sembilan belas yang berusaha menyamakan demokrasi modern ini dengan demokrasi borjuis.

Demokrasi dalam pandangan Lefort, bukan sekedar menekankan mengenai institusi yang bersifat spesifik dan berkelompok, tetapi hampir mirip dengan bentuk politik pada masyarakat modern. Di dalam demokrasi, terbentuknya masyarakat merupakan hasil dari artikulasi yang dalam hal ini meliputi konfigurasi kepastian kekuasaan dan konsep kepastian pada karakteristik simbol kekuasaan itu sendiri. ( Lefort 1987 : 20 ). Politik demokrasi mulai muncul dan menyebar ke seluruh Eropa di pertengahan dan awal masa modern. Konsep demokrasi merupakan hasil transformasi bertahap dari gagasan mengenai peroleh kedaulatan yang diperoleh dari hasil artikulasi kehendak di dalam masyarakat. Hasil pertarungan untuk memperoleh kekuasaan yang dilakukan dengan menjadikan artikulasi kehendak masyarakat ini, tidak serta merta mencampurkan semua anasir lainnya yang ada di dalam masyarakat. Ruang kuasa ini tempat untuk memperoleh kekuasaan ini, dipisahkan dari ruang ekonomi, ruang hukum dan ruang pengetahuan. Kedaulatan dan legitimasi kekuasaan yang diperoleh di dalam mekanisme demokrasi di dasari oleh suara mayoritas dari masyarakat.

Demokrasi memiliki dua prinsip yang ada di dalam dirinya. Yang pertama adalah bahwa legitimasi dari kekuasaan yang diperoleh melalui mekanisme ini diperoleh dari kehendak masyarakat. Kekuasaan yang diperoleh bukanlah sekedar hadiah Ilahi yang tidak semua orang mampu mendapatkannya, tetapi benar-benar dari hasil sebuah pertarungan yang memungkinkan semua orang berkompetisi di dalam ruang tersebut. Prinsip kedua adalah bahwa kekuasaan dalam demokrasi bersifat

tanpa tubuh. Kedua prinsip tersebut dapat kita lihat dengan jelas melalui kutipan di bawah ini :

*“Democracy is sustained by the tension between two principles: on the one hand, power stems from the people; on the other hand, it is the power of nobody. The principle that power belongs to nobody is reflected in the contemporary institutionalized forms of competition between political parties, but the general significance of the principle goes beyond any particular institutional arrangement.”* (“Demokrasi dipertahankan oleh tensi antara dua prinsip. Di satu sisi, kekuasaan dibendung atau dibatasi oleh masyarakat. Di sisi lain, kekuasaan tersebut bersifat tanpa tubuh. Prinsip bahwa kekuasaan sesuai dengan sifat tanpa tubuh ini merupakan hasil refleksi dalam bentuk institusional kontemporer yang bersifat kompetisi antara bagian yang ada dalam politikal, tetapi signifikansi umum dari prinsip ini, bersembunyi dibalik dari susunan institusional apapun.) (Lefort, 1987, 21).

Kekuasaan tidak lagi seperti pada masa monarki, yang mana kekuasaan menubuh di dalam diri seorang raja. tetapi kekuasaan berada di dalam masyarakat yang tidak memiliki tubuh secara fisik. Walaupun tidak memiliki bentuk fisik tetapi kekuasaan itu benar-benar ada.

Politik demokrasi ini tidak bisa lepas dari gagasan mengenai hak. Di dalam sejarah masyarakat Eropa dari masa Yunani kuno, abad pertengahan hingga masa modern, kekuasaan memiliki corak yang hampir sama. Hak kesetaraan politik masih terbelenggu di dalam masa-masa tersebut. Pada masa Yunani kuno misalnya, ketika konsep demokrasi langsung lahir, kesempatan untuk berpartisipasi di dalam demokrasi tersebut masih terbatas.<sup>23</sup> Berbeda pada abad pertengahan, bahwa politik dan agama dicampuradukan. Segala urusan politik, ekonomi, pengetahuan menjadi semata-mata urusan dari gereja. Rakyat biasa tidak perlu ikut campur dalam urusan tersebut. Tugas dari rakyat di dunia ini adalah bekerja untuk menghapus dosa-dosa mereka sendiri. Oleh karena itu, hak kesetaraan politik ini tidak benar-benar dimiliki oleh rakyat.

---

<sup>23</sup> Mereka yang boleh berpartisipasi adalah laki-laki dewasa. Perempuan, anak-anak, bahkan budak laki-laki tidak mendapatkan hak kesetaraan yang sama untuk memilih dan dipilih.

Perjuangan akan hak asasi manusia untuk memperoleh kesetaraan politik merupakan prinsip general di dalam demokrasi. Bagi Lefort sendiri, kesadaran akan memperjuangkan hak asasi ini menjadi dasar agar demokrasi benar-benar dapat ditegakkan. Jika kita berbicara mengenai demokrasi, kesadaran bahwa perolehan hak politik merupakan kesadaran yang dibangun atas dasar doktrin religius harus benar-benar disingkirkan (Lefort, 1987, 260). Hak kesetaraan politik berarti tidak lagi mempermasalahkan ras, suka, agama, bahkan gender. Semua diferensiasi sosial tersebut harus diruntuhkan demi prinsip demokrasi itu sendiri.

Topologi masyarakat demokrasi tidak lagi sama dengan masyarakat sebelumnya. Jika kita telah mengetahui bahwa di dalam masyarakat totalitarianisme, topologi masyarakatnya sangat menghindari konflik, menekankan kepada kesetiaan kepada pemerintah ataupun penguasa, tidak demikian lagi, dalam masyarakat demokrasi. Topologi masyarakat demokrasi memiliki ciri konflik. Kondisi alamiah masyarakat demokrasi dibangun di atas pemahaman bahwa mereka selalu mengalami konflik yang takberkesudahan. Fakta pluralitas dan perbedaan yang tak terjembatani ini merupakan salah satu keuntungan bagi demokrasi itu sendiri. Topologi masyarakat ini merupakan pandangan yang penting seperti yang dipaparkan dalam uraian di bawah ini :

*“What we have to examine, then, is the meaning of conflicts which presuppose both the fact of power and the attempt to gain respect for different rights. These conflict are becoming more and more characteristic of modern democratic societies. The agency of state power, and its ever more extensive intervention, is an ineffaceable aspect of these societies.”* (“Apa yang harus diperiksa kemudian adalah arti dari konflik yang percaya sebelumnya antara fakta kekuasaan dan berusaha untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk respek dari hak-hak yang berbeda-beda. Konflik ini menjadi karakteristik lebih dari masyarakat demokrasi modern. Agen kekuasaan negara, dan intervensi ekstensif merupakan aspek yang tidak bisa dihilngkan dalam masyarakat ini.”) ( Lefort, 1987, 265).

Politik yang memperjuangkan hak asasi manusia dengan politik demokrasi memiliki tujuan yang sama. Mereka sama-sama berjuang untuk saling melengkapi agar setiap manusia memiliki kesetaraan dalam hal kebebasan. Politik hak asasi

manusia dan politik demokrasi tercipta sebagai respon dari eksploitasi kebebasan dan kreatifitas di dalam masyarakat. Sebagai respon dari kepuasan artifisial yang diberikan oleh politik totalitarianisme.

Karakteristik totalitarianisme memiliki ciri memberangus semua kebebasan individual. Namun, konsep politik demokrasi tercipta untuk menyerang totalitarianisme dan memperjuangkan kebebasan individual. Kesetaraan kondisi untuk setiap individu menjadi prinsip fundamental dalam politik demokrasi itu sendiri. Pandangan mengenai konsep ini terlihat melalui pemikiran Lefort seperti yang ada pada uraian di bawah ini :

*“Despite his effort to see equality of condition as the fundamental fact from which all seem to be derived, he leaves us in no doubt that the meaning it acquires in democratic society is very different from the meaning it had under the Anciet Regime.”* (“Meskipun dia berusaha untuk melihat persamaan kondisi sebagai fakta fundamental dari semua yang terlihat untuk diturunkan, dia meninggalkan kita tanpa keraguan sama sekali bahwa pengertian tersebut diperoleh dalam masyarakat demokrasi, tentunya pengertian ini sangat berbeda pada regim pola kuasa lama.”) (Lefort, 1988 ,172)

Kesetaraan kondisi politik menjadi jalan untuk mendapatkan representasi politik seutuhnya yang dihasilkan melalui mekanisme demokrasi ini. Berbeda dengan demokrasi, politik totalitarianisme yang melekat pada monarki, bahwa raja dipilih bukan karena kehendak rakyatnya. Raja seolah-olah memiliki dunia tersendiri dan berbeda dunia dengan rakyatnya. Oleh karena itu, pada model monarki, raja bukan lah manifestasi dari representasi kehendak rakyatnya. Sedangkan di dalam demokrasi penguasa dipilih melalui pertarungan kekuasaan yang dilegitimasi oleh kehendak mayoritas rakyatnya. Oleh karena itu, penguasa yang terpilih merupakan representasi dari rakyatnya ( Lefort :1988 : 172).

Ada pandangan yang mengatakan bahwa demokrasi bukanlah berbicara mengenai pencapaian tujuan. Akan tetapi, sebenarnya demokrasi juga memiliki tujuan. Tujuan dari demokrasi adalah bahwa semua lapisan masyarakat memiliki kondisi kesetaraan yang sama dalam hal berpartisipasi. Tujuan ini merupakan tujuan awal dan terpenting yang senantiasa diperjuangkan oleh demokrasi. Demokrasi juga

memberikan kesempatan kepada semua orang untuk mengontrol pemerintahan secara berkala. Kekuasaan diperoleh melalui kompetisi. Ketika telah memperoleh kekuasaan tidak serta merta kompetisi menjadi hilang. Penguasa dituntut untuk selalu memberikan kemampuan yang terbaik guna agar dapat bertahan. ( Lefort, 1988, 175).

Kedaulatan kekuasaan mengalami transformasi dari masa politik totalitarianisme sampai dengan politik demokrasi. Jika pada masa politik totalitarianisme, kedaulatan dipegang oleh satu orang ataupun kelompok tertentu, berbeda dengan politik totalitarianisme, kedaulatan di masa demokrasi berubah menjadi kedaulatan sosial. Rakyat yang memberikan kedaulatan kepada penguasanya.

Pengetahuan tidak lagi dikuasai oleh segelintir orang – dalam hal ini raja- . Pengetahuan berkembang di dalam masyarakat dengan sendirinya. Dalam hal memilih seorang penguasa juga tergantung kepada pandangan masyarakat tentang calon yang sedang berkompetisi. Tidak ada lagi monopoli dari penguasa terhadap opini dan pengetahuan yang dipaksakan kepada rakyat. Rakyat memiliki kebebasan penuh di dalam menentukan pendapatnya mengenai calon yang sedang berkompetisi tersebut.

Pada regim demokrasi, posibilitas politik mengalami perubahan. Jika pada regim totalitarianisme tidak dimungkinkan politik berubah, pada demokrasi itu menjadi sebuah keniscayaan. Pada regim demokrasi, revolusi dapat dimungkinkan untuk terjadi. Hal ini dapat dimungkinkan mengingat di dalam masyarakat demokrasi kondisi alamiah adalah penuh dengan konflik. Konflik menjadi salah satu suplemen penting untuk mengadakan sebuah revolusi. Kekuasaan menjadi mungkin senantiasa berubah karena *game of number* yang menjadi ciri khas dari demokrasi. Perubahan posibilitas politik ini diungkapkan oleh Lefort seperti yang dijelaskan di bawah ini :

*“Its institutions organize and adjust the space of society conflict. The diversity of interest which are defined and expressed in the context of civil society provides the established power with the means to defend itself against the most energetic activities of contestation. The possibility of political change brought about through public opinion, of a displacement of majority during the next elections, leaves many people hope of having some hold on the future.”* (“Lembaga tersebut mengatur dan menyesuaikan diri kepada konflik yang ada dalam ruang masyarakat. Keanekaragaman minat yang didefinisikan dan dinyatakan dalam konteks masyarakat sipil menyediakan pengkokohan

kekuasaan dengan maksud untuk mempertahankan dirinya sendiri dalam melawan aktivitas kontestasi yang paling kuat. Kemungkinan politik berubah melalui opini publik. Perubahan ini mengambillalih mayoritas pada pemilihan selanjutnya. Meninggalkan banyak harapan orang-orang yang tertahan pada masa depan.”) ( Lefort, 1987, 308 ).

Originalitas dari politik demokrasi adalah kekuasaan akan senantiasa bertarung karena tidak ada ada kekuasaan yang tetap di dalam demokrasi. Kekuasaan, pengetahuan dan hukum tidak lagi menubuh kepada seorang raja semata, tetapi kekuasaan, pengetahuan dan hukum tersebut mencair dan berdinamika di dalam masyarakat. Selain itu, dalam hal masyarakat, demokrasi senantiasa menerima konflik sebagai keniscayaan di dalam tubuh masyarakat itu sendiri. ( Lefort,1988, 34)

Dalam masyarakat demokrasi, penguasa bukan lagi memaksakan opininya agar diterima oleh masyarakat untuk memilih dia kembali dalam kompetisi politik selanjutnya. Akan tetapi, penguasa dituntut berkompetisi dengan para pesaingnya untuk mempengaruhi dan membentuk opini secara sukarela kepada masyarakat agar dipilih menjadi penguasa kembali. Oleh karena itu kompetisi tidak bisa dipisahkan dalam masyarakat demokrasi. ( Lefort, 1988, 35).

### **3. 3 Demokrasi sebagai Ruang Kosong**

Totalitarianisme secara nyata mengancam hak kesetaraan politik setiap individu. Kebebasan senantiasa dibelenggu dan tidak diberikan kesempatan untuk bernafas. Berangkat dari problem ini, Lefort melontarkan gagasannya mengenai demokrasi sebagai ruang kosong. Pertama-tama, terlebih dahulu kita harus memeriksa kondisi sosial di regim totalitarianisme dan regim demokrasi. Pada totalitarianisme karakteristik dalam masyarakatnya bersifat homogen, percaya kepada harmonisasi, dan menghindari konflik. Berbeda dengan totalitarianisme, demokrasi dalam pandangan Lefort adalah dibangun di atas masyarakat yang heterogen, yang selalu berkonflik dan harmoni merupakan sebuah utopis.

Demokrasi memberikan kesempatan hak pilih kepada masyarakat. Kesempatan yang tidak pernah diperoleh masyarakat jika berada di bawah kekuasaan

totalitarianisme. Hak pilih masyarakat bahkan menjadi sangat penting, karena merupakan jalan untuk legitimasi kedaulatan yang dimiliki oleh penguasa.

Demokrasi sebagai sebuah simbol ruang kekuasaan yang dibiarkan kosong, merupakan hasil dari revolusi demokrasi. Revolusi yang tercetus untuk meruntuhkan rezim totalitarianisme di dalam politik. Revolusi yang membuat terjadi sebuah mutasi ruang kuasa. Ketika ruang kuasa pada masa monarki dan rezim totalitarianisme telah terisi penuh oleh keluarga raja dan kelompok penguasa, berubah menjadi kosong, tidak ada lagi penanda-penanda kepastian yang mengisi penuh ruang kuasa. Sehingga ketegangan-ketegangan di dalam ruang kuasa tetap terpelihara. Pernyataan lebih komprehensif mengenai ruang kuasa kosong dapat kita lihat dari kutipan di bawah ini :

*“In the case of the empty place of power, it is obvious that power does not disappear – it remain there as something which is emptied : as a dimension whose factual ( of ontic) content may disappear while the dimension as such stays operative. And “the dissolution of the markers of certainty” is not only a particular phenomenon, but defines the universal, that is, ontological, horizon of our condition.”* (“Pada persoalan ruang kosong kekuasaan, jelas bahwa kekuasaan dihilangkan- kekuasaan masih merupakan sesuatu yang kosong, sebagai sebuah dimensi yang berisi faktual dalam ontik boleh dihilangkan, sementara dimensinya masih tetap beroperasi. Dan “pembubaran penanda-penanda kepastian” bukan hanya sebuah fenomena particular semata, tetapi didefinisikan secara universal yang disebut sebagai ontological, horizon dari kondisi kita.”) ( Marchart, 2007, 85)

Di dalam politik totalitarianisme, terdapat anasir-anasir yang menjadi penanda kepastian. Anasir-anasir itu berupa kekuasaan yang bersifat asimetris yang di dasari oleh garis keturunan dan persamaan ideologi semata. Selain itu, legitimasi dari agama dapat juga menjadi sebuah penanda kepastian di dalam ruang kuasa. Oleh karena itu, agar ruang kuasa tetap kosong, maka penanda-penanda kepastian yang mengisi penuh ruang kuasa, harus diruntuhkan.<sup>24</sup> Penanda-penanda kepastian bukan hanya terjadi di dalam regenerasi kekuasaan semata, tetapi juga pemahaman tentang karakteristik dari

---

<sup>24</sup> Dua slogan utama mengenai gagasan Lefort adalah mengenai “ *the dissolution of the markers of certainty*” serta “ *the place of power is empty*”.

seorang raja. Seorang raja di dalam masa monarki, memiliki banyak keistimewaaan yang akan menjadi penanda-penanda kepastian. Pengetahuan, hukum, dan ekonomi semua melebur di dalam diri seorang raja. Peleburan ini berubah menjadi penanda-penanda kepastian karena senantiasa menutup ruang antagonistik di dalam ruang kuasa.

Ruang kuasa di dalam demokrasi bersifat kontingen. Semua identitas sosial bersifat kontingen. Oleh karena itu, kekuasaan yang diperoleh melalui mekanisme demokrasi merupakan sebuah kekuasaan yang dibangun atas dasar yang tidak stabil ataupun rapuh.<sup>25</sup> Kekuasaan sewaktu-waktu dapat runtuh karena, senantiasa diganggu oleh *the symbolic*. *The real* tidak akan pernah benar-benar utuh padu niscaya karena selalu diganggu oleh *the symbolic* tersebut. Seperti membangun sebuah fondasi diatas dasar yang rapuh. Begitu juga demokrasi. Melalui demokrasi, fondasi-fondasi yang dibangun tidaklah bersifat kokoh dan kuat terhadap gangguan. Demokrasi menjadikan fondasi-fondasi tersebut tidak aman dari gangguan. Oleh karena itu, disharmonisasi, konflik, kelabilan menjadi sebuah hal yang baik dalam demokrasi.

Agar dapat proliferaatif, demokrasi mengandaikan juga absennya fondasi yang secara konstitutif bersifat final. Fondasi yang final dan kokoh tidak dimungkinkan dapat terjadi di dalam model politik ini. Sebagai contoh, seseorang yang bertarung untuk menjadi presiden melalui mekanisme demokrasi selalu mengandaikan bahwa kekuasaannya tidak diperkenankan bersifat tetap dan absolut. Oleh karena itu, konstitusi berfungsi untuk membatasi masa kekuasaan seorang presiden.

Ruang kuasa akan selalu terbuka, karena masyarakat di dalam pandangan Lefort memiliki ciri antagonisme. Gagasaan antagonisme ini yang membawa Lefort dikategorikan sebagai seorang pemikir *post-foundational*. ( Marchart, 2007, 86).<sup>26</sup> Ciri seorang pemikir *post-foundational* adalah membedakan secara tegas antara gagasan politik dan politikal. Menurut lefort politikal bukan sebuah aktivitas, tetapi

---

<sup>25</sup> Lefort juga dikenal sebagai seorang pemikir yang dikategorikan sebagai pemikir *post-foundational*.

<sup>26</sup> Marchart mengkategorikan Lefort sebagai pemikir *post-foundational* karena gagasan Lefort memiliki warna yang kuat terhadap gagasan tersebut. Paradigma *post-foundational* sendiri, menekankan gagasan antagonisme sebagai divisi orginal sebagai sebuah konsep penting. Selain itu, paradigma *post-foundational* juga mebuat pembedaan secara tegas antara *politics* dan *the political*.

merupakan sebuah cara dalam institusi sosial. *Political* ini bersifat kabur ataupun abstrak. Sedangkan politik hanyalah sebuah *subsystem* atau sebuah metode menerapkan *political* tersebut<sup>27</sup>. Ruang kuasa yang kosong diandaikan harus tetap ada untuk mengakomodasi ketegangan antagonistik di dalam masyarakat.

Demokrasi dapat menjadi kosong juga dikarenakan oleh topologi masyarakat yang bersifat heterogen. Dalam masyarakat heterogen, konflik akan tumbuh subur. Konflik bahkan dipelihara demi proliferasi demokrasi itu sendiri. Konflik senantiasa menjaga ruang kuasa untuk tidak mengalami stagnasi.

Ruang kuasa menurut Lefort tidak akan pernah terisi penuh absolut, karena kedaulatan kekuasaan bukan dipegang oleh satu orang atau berada di dalam diri seorang raja, tetapi tetap dipegang segenap rakyat. Seorang presiden dapat dipilih kembali hanya dengan cara menyakinkan masyarakat banyak untuk memilihnya kembali. Oleh karena itu, bahwa ruang kuasa itu selalu terbuka dan tidak akan pernah terisi penuh, terjadi karena sangat tergantung oleh keputusan masyarakat yang bersifat tentatif: sebuah imagi kedaulatan populer. Penjelasan mengenai gagasan mengenai kedaulatan ini dapat kita lihat melalui pendapat Lefort di bawah ini :

*“The emergence of the democratic form of society was the result of a series of transformations which began to take place in medieval and early modern Europe. Among these transformations was the gradual development of a system of states based on a notion of sovereignty and differentiated from the societies within which they exercised power.”* (“Munculnya bentuk masyarakat demokrasi merupakan hasil dari serangkaian transformasi yang mulai berlangsung pada era Eropa modern dan awal abad pertengahan. Di antaranya, pengembangan transformasi bertahap suatu sistem negara berdasarkan gagasan kedaulatan dan dibedakan dari masyarakat yang mendaulatkan mereka untuk memegang kekuasaan.”) (Lefort, 1987, 21).

Kekuasaan tidak lagi bersifat materialistik, tetapi bersifat ontologis. Karena kekuasaan tidak lagi menubuh di dalam diri seorang raja, tetapi di dalam kedaulatan

---

<sup>27</sup> “... the difference between politics – as subsystem or mode of action- and the political as society’s grounding dimension.” (Marchart, 2007, 90)

rakyat. Lantaran kedaulatan yang dipegang oleh rakyat ini, maka reproduksi kekuasaan senantiasa terjadi dan bersifat temporal. ( Lefort, 1988, 18)

Masyarakat demokrasi sebagai subjek penting adalah masyarakat yang dibangun tanpa sebuah tubuh. Maksudnya, tubuh seorang raja tidak lagi memenuhi ruang seperti rezim totalitarian. Masyarakat yang berubah merongrong representasi totalitarian organik. Determinasi natural yang dilakukan oleh sesosok raja atau seseorang yang memiliki eksistensi yang terhormat digerogeti menjadi sebuah masyarakat yang para individunya memiliki status sosial universal yang sama. Keterangan mengenai kedaulatan rakyat ini ditegaskan oleh Lefort dalam kalimat di bawah ini :

*“Democratic society is instituted as a society without a body, as a society which undermines the representation of an organic totality.”* (“Masyarakat demokratis adalah didirikan sebagai sebuah masyarakat tanpa tubuh, sebagai masyarakat yang menggerogoti representasi dari totalitas organik.”) ( Lefort, 1988, 18).

## **IKHTISAR**

Problem filsafat politik Claude Lefort dapat dipahami secara holistik dari melihat secara gamblang mengenai perbedaan pola kuasa lama yang *embodied* dalam sistem totalitarianisme dan juga pola kuasa baru yang menjadi ciri khas dari sistem demokrasi.

Pola kuasa lama menekankan kepada keistimewaan yang dimiliki oleh seorang raja. Raja memiliki keistimewaan meruang dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Akibatnya masyarakat tidak memiliki kebebasan dan kesempatan untuk mengembangkan diri mereka masing-masing karena telah ditutup oleh kekuasaan raja.

Pola kuasa lama juga memberikan sebuah fakta, bahwa regenerasi kepemimpinan tidak dilakukan secara *fair*. Perpindahan kepemimpinan hanya terjadi dalam kerabatnya raja semata. Di luar kerabatnya raja, mustahil dapat menjadi seorang raja. Raja juga memiliki keistimewaan, yakni seorang raja dianggap sebagai titisan Tuhan. Melalui keistimewaan ini, raja menjadi begitu dikultuskan

masyarakatnya. Di mata rakyatnya, seorang raja tidak pernah melakukan kesalahan meskipun secara nyata tindakan raja sangat kejam.

Pada pola kuasa lama, kekuasaan raja meruang secara absolut. Kekuasaan raja bukan hanya berada dalam koridor politik birokrasi semata, tetapi juga dalam koridor-koridor lainnya. Seperti, koridor pengetahuan, ekonomi, hukum dan sosial. Raja menjadi dasar parameter untuk menentukan nilai-nilai ataupun keputusan dalam koridor tersebut.

Sementara itu, pola kuasa baru merupakan kebalikan dari konsep pola kuasa lama. pada pola kuasa baru yang menubuh pada politik demokrasi, memiliki ciri kesetaraan kesempatan kepada rakyat jelata untuk berpartisipasi dalam arena politik. Siapa saja dapat bertarung tidak ada faktor primordial yang menghalangi untuk dapat terjun bertarung.

Kekuasaan raja pada pola kuasa baru juga dibatasi oleh konstitusi. Kekuasaan raja tidak bersifat seumur hidup, karena memiliki mekanisme periodisasi kepemimpinan berkala. Selain itu, menjadi seorang penguasa bukan merupakan sebuah hadiah, akan tetapi merupakan sebuah perjuangan dengan menyakinkan rakyat.

Politik totalitarianisme juga merupakan sebuah konsep politik yang sangat buruk. Politik totalitarianisme sangat tidak menyukai oposisi terhadap pemerintahan. Relasi antagonis yang berada dalam ruang publik sengaja untuk dihilangkan. Alasannya sederhana saja. pemerintah tidak ingin mengambil resiko bahwa oposisi memiliki potensi mengganggu stabilitas kekuasaan pemerintah jika diberikan ruang untuk hidup.

Politik totalitarianisme juga memberikan ciri pengkultusan kepada penguasa. Pengkultusan ini dapat terjadi dengan menggunakan berbagai cara. Salah satunya dengan menggunakan mesin politik partai pemerintah itu sendiri. Dengan bantuan partai pemerintah proses pengkultusan dapat berjalan dengan mudah karena menggunakan pendekatan ideologis.

Berposisi kontradiktoris, politik demokrasi mengembalikan *isonomia* ( kesetaraan politik) yang telah diberangus oleh rezim totalitarianisme. Demokrasi

mengembalikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara untuk terjun aktif berpartisipasi dalam arena politik. Melalui mekanisme demokrasi inipun, kekuasaan absolut penguasa dapat dinetralisir.

Konsep Lefort mengenai filsafat politik menekankan kepada pencegahan terhadap pemenuhan ruang kuasa yang dilakukan oleh penguasa. Dengan menggunakan bantuan demokrasi, pemenuhan ruang kuasa dapat dicegah.

Agar dapat terrealisasi konsep demokrasi sebagai ruang kosong, menurut Lefort harus diandaikan bahwa masyarakat dibangun diatas fondasi yang rapuh yang senantiasa dapat goyah. Dengan pengandaian ini, maka absolutisme kekuasaan dapat dihindari, karena senantiasa kekuasaan mendapat gangguan yang membuat demokrasi itu sendiri menjadi lebih proliferaatif. Selain itu, masyarakat diandaikan memiliki kondisi alamiah sarat konflik. Konflik tersebut diandaikan bersifat niscaya. Berdasarkan ini, maka absolutisme kekuasaan juga tidak akan pernah terjadi, karena kehidupan harmonis dibatasi oleh konflik itu sendiri.

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Ikhtisar**

Totalitarianisme bukanlah sebuah sistem yang pada saat ini telah berhenti mengancam demokrasi. Totalitarianisme secara nyata masih ada hingga kini. Melihat fenomena kontemporer tersebut, maka agar dapat memahami totalitarianisme secara holistik dibutuhkan sebuah pemahaman komprehensif mengenai politik totalitarianisme melalui beberapa pendekatan. Pendekatan yang dapat dilakukan antara lain memahami totalitarianisme secara etimologis. Pemahaman ini dibutuhkan untuk memberikan sebuah kedalaman makna terhadap kata totalitarianisme itu sendiri. Totalitarianisme berasal dari kata totalitarian + isme. Totalitarian adalah sebuah sebutan untuk sistem pemerintahan yang terpusat, diktatorial serta menuntut kepatuhan penuh kepada negara. Sedangkan isme merupakan sebuah corak sistem, paham ataupun tipikal ideologi politik. Sehingga, boleh disimpulkan bahwa totalitarianisme merupakan sebuah sistem ataupun ajaran yang menuntut warga negara agar mematuhi kehendak pemerintah secara total.

Totalitarianisme juga secara nyata pernah menjadi bagian dari sejarah peradaban manusia. Beberapa negara yang pernah menerapkan sistem totalitarianisme ini antara lain Jerman dan Uni Soviet. Kedua negara ini merupakan negara yang sering diacu untuk melakukan studi yang berkaitan dengan diskursus totalitarianisme. Jerman menerapkan sistem totalitarianisme dengan mengkamufase nasionalisme untuk memperoleh dukungan dari masyarakat supaya eksistensi pemerintahannya dapat bertahan. Sedangkan Uni Soviet, bukan menggunakan propaganda nasionalisme, tetapi dengan menanamkan doktrin komunisme sebagai ideologi negara tersebut. Disamping propaganda yang mereka lakukan itu, kedua negara tersebut kerap menggunakan kekuatan militernya sebagai sarana pelanggaran kekuasaan pemerintah. Penggunaan kekuatan militer kedua negara ini tercermin dari dibangunnya kamp-kamp konsentrasi. Di kamp konsentrasi dibangun untuk dijadikan sebagai tempat penampungan orang-orang yang dianggap berbahaya

oleh pemerintah. Misalnya Jerman, Kamp konsentrasi ini banyak diisi oleh orang Yahudi karena di anggap dapat mengganggu stabilitas kekuasaan negara.

Menurut pandangan Hannah Arendt, totalitarianisme merupakan sebuah sistem politik yang secara hakiki baru. Lebih lanjut Arendt menegaskan bahwa politik totalitarianisme merupakan sebuah sistem yang berbeda dengan sistem politik buruk lainnya seperti tirani, otoriter dan despotik. Bagi Arendt, pemerintah totaliter di Jerman, menggunakan propaganda antisemitisme sebagai pembakar nasionalisme. Pemerintah Nazi sengaja mengorbankan orang-orang Yahudi agar dukungan dari rakyatnya dapat diperoleh secara maksimal. Selain itu, Pemerintah Nazi juga menggunakan imperialisme yang digunakan untuk menunjang keuangan pemerintah totaliter di Jerman. Caranya adalah dengan menjadikan bankir- bankir Yahudi sebagai sapi perahan dengan memaksa membiayai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Totalitarianisme merupakan sebuah sistem politik yang sangat kejam dan buruk. Kesimpulan ini tidak dapat dibantah karena sudah terbukti sah melalui verifikasi historis. Melihat konsekuensi negatif jika sistem ini diterapkan, maka dibutuhkan sebuah sistem alternatif solutif. Sistem politik tersebut adalah demokrasi. Demokrasi adalah sebuah sistem yang diyakini mampu mengatasi kelemahan dan efek negatif yang ditimbulkan oleh sistem totalitarianisme ini.

Totalitarianisme memberikan sebuah konsekuensi negatif. Konsekuensi totalitarianisme dapat terlihat dari pola kuasa yang diterapkan pada politik totalitarianisme. Konsekuensi negatif tersebut di antaranya adalah menyandera kesetaraan politik warga negara. Kekuasaan pada totalitarianisme bersifat tertutup. Bisa dipastikan tidak dimungkinkan terjadinya mobilitas ke atas dalam urusan kekuasaan. Selain itu, penguasa kerap kali melakukan tindakan semena-mena dan sesukanya sendiri. Hal ini terjadi, karena memang kekuasaan seorang penguasa tidak terbatas. Penguasa juga yang membuat hukum menurut pertimbangan rasionalnya sendiri. Oleh karena itu, terkadang hukum tidak memihak kepada keadilan.

Sementara itu, demokrasi juga memiliki konsekuensi. Tentu konsekuensinya bersifat kontradiksi dengan totalitarianisme. Demokrasi mengembalikan isonomia kepada semua warga negara. Semua warga negara memiliki hak yang sama dengan

penguasa untuk bertarung dalam sebuah kompetisi untuk mendapatkan kekuasaan. Tidak ada yang boleh melarang seseorang untuk berkompetisi jika memiliki kapabilitas yang mumpuni. Selain itu demokrasi memberikan dampak positif yakni membuat politik lebih berdinamika. Tidak perlu lagi melakukan kudeta untuk memperoleh kekuasaan. Tetapi, demokrasi dengan didukung oleh mekanisme konstitusi dengan sendirinya sudah cukup untuk menjamin kesempatan dalam berpolitik.

Lefort menekankan kembali untuk mengingatkan kepada kita mengenai bahayanya jika sistem totalitarianisme tetap diterapkan pada saat ini. Dia memperlihatkan efek negatif politik totalitarianisme dengan menganalisis mengenai pola kuasa pada sistem totalitarianisme dan demokrasi. Pada pola kuasa lama, memperlihatkan bahwa tidak ada dinamika dalam politik. Kekuasaan berjalan monoton. Tidak ada revitalisasi jika penguasa mengalami kemandegan. Jika ingin melakukan perubahan, satu-satunya jalan hanya dengan melakukan kudeta kepada sang penguasa. Kondisi sebaliknya diperlihatkan oleh pola kuasa di era demokrasi ini. Pada pola kuasa baru ini, kegairahan dinamika politik senantiasa hadir. Kekuasaan seorang penguasa tidak lagi bersifat mengisi ruang dan mengabsolutkan kekuasaannya. Regenerasi dilakukan secara temporal berkala dan dijamin oleh mekanisme konstitusi. Sebagai contoh di Indonesia, konstitusi membatasi masa jabatan seorang presiden dengan memberikan kesempatan untuk menjabat hanya 2 kali periode. Setelah itu apapun alasannya presiden tersebut tidak diperkenankan untuk kembali berkuasa. Dengan memberikan batasan periode kekuasaan ini, dapat mencegah terjadinya kekuasaan yang bersifat totaliter, karena memungkinkan penguasa yang terlalu kental mewarnai sistem dan stabilnya kekuasaan serta merampas keistimewaan anasir-anasir alternatif politik di luar dirinya. Kekuasaan yang terlalu lama, besar potensinya untuk berubah menjadi totaliter. Oleh karena itu, di era demokrasi ini kekuasaan tidak lagi bersifat permanen dan absolut.

Demokrasi sebagai ruang kosong merupakan sebuah penegasan konseptual untuk mengganti konsep totalitarianisme tersebut. Demokrasi dalam pandangan Lefort adalah sebuah sistem yang di dalamnya ruang kuasa tidak dipenuhi secara

permanen dan absolut oleh kekuasaan penguasa. Penguasa tidak memenuhi ruang kuasa secara permanen artinya bahwa kekuasaan penguasa diandaikan temporal, punya batasan waktu. Regenerasi kekuasaan dibuat secara berkala sehingga memberikan kesempatan yang sama kepada orang lain untuk menggantikan penguasa tersebut. Untuk itu diperlukan sebuah perangkat aturan konstitusi yang membatasi masa jabatan seorang penguasa. Sementara itu, ruang kuasa tidak bersifat absolut artinya bahwa kekuasaan penguasa itu tidak bersifat memenuhi ruang. Seorang penguasa tidak boleh masuk ke dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Segala aspek kehidupan masyarakat tidak lagi diatur oleh kehendak penguasa. Oleh karena itu, demokrasi dalam pandangan Lefort diandaikan senantiasa mensyaratkan ruang kosong dalam ruang kuasanya agar kekuasaan penguasa tidak memenuhi ruang.

## **4.2 Kesimpulan**

### **4.2.1 Mengapa Demokrasi mampu mencegah kekuasaan totaliter.**

Telah dipaparkan di atas mengenai totalitarianisme dan demokrasi. Totalitarianisme memiliki konsekuensi negatif. Konsekuensi-konsekuensi negatif totalitarianisme ini telah dijelaskan pula di atas. Oleh karena itu, kekuasaan yang bersifat totaliter ini perlu dicegah. Untuk mencegah kekuasaan yang bersifat totaliter tersebut dibutuhkan sebuah sistem politik sebagai alternatif solutif. Sistem tersebut adalah demokrasi. Demokrasi memiliki sifat dan konsekuensi yang mampu mencegah kekuasaan totaliter. Demokrasi mengembalikan isonomia warga negara. Hal ini sangat penting agar kekuasaan totaliter yang menutup ruang kesempatan masyarakat dapat dibuka sebebaskan-bebasnya. Demokrasi juga memberikan jaminan agar kekuasaan tidak lagi bersifat permanen dan absolut. Dengan dukungan konstitusi yang terbentuk melalui mekanisme demokrasi maka sifat permanen dan absolut yang selama ini diidentikan dengan sistem totalitarianisme dapat dicegah. Demokrasi memiliki karakteristik yang mampu mencegah kecenderungan totaliter, lantaran masyarakat demokrasi dibangun atas dasar kepercayaan bahwa konflik bersifat tak berkesudahan. Konflik justru sangat diperlukan agar demokrasi lebih proliferaatif. Menghargai dan memberikan tempat kepada konflik ini memperlihatkan bahwa

demokrasi mampu mengakomodasi kondisi alamiah masyarakat tersebut. Berbeda dengan sistem totaliter yang sengaja merepresi konflik bahkan melenyapkannya. Dengan memberikan tempat dan menyadari bahwa di dalam masyarakat memiliki sifat konflik yang tak berkesudahan maka dengan sendirinya kekuasaan totaliter itu dapat dicegah.

Selain itu, demokrasi meluluhkan kekuasaan absolut yang ada dalam tubuh seorang penguasa. Demokrasi mencegah agar kekuasaan tidak meruang seperti yang kerap terjadi pada model totaliter. Demokrasi dengan bantuan konstitusi menjadikan kekuasaan tidak lagi meruang. Penguasa hanya mengurus urusan yang ada dalam koridor kekuasaannya semata, sementara urusan dalam spektrum kuasa lain diurus oleh instansi berbeda sendiri.

Demokrasi sebagai sarana terapeutik yang mampu mengatasi efek negatif totalitarianisme. Cara-cara humanis lebih diutamakan sebagai langkah konkret untuk penawar tindakan yang kerap dilakukan oleh totalitarianisme. Demokrasi tidak lagi menggunakan pendekatan represif melalui kekuatan militer seperti yang kerap terjadi pada pemerintahan totalitarianisme. Dalam demokrasi tidak ada pemaksaan terhadap masyarakat dalam pemilihan penguasa. Penguasa tidak lagi menggunakan cara-cara koersif untuk memperoleh dukungan dari masyarakat, tetapi dengan cara-cara lebih humanis yakni pendekatan persuasif.

Demokrasi juga tidak memandang bulu siapa yang pantas untuk menjadi seorang penguasa. Siapapun dapat menjadi seorang penguasa asal dipilih oleh mayoritas masyarakat. Menjadi seorang penguasa tidak lagi dibatasi oleh perbedaan primordial semacam agama, ras dan suku. Demokrasi membuka akses sebesar-besarnya dan kepada segenap pihak seluas-luasnya.

#### **4.2.2 Kritik terhadap kondisi fenomena politik Indonesia saat ini.**

Di awal kemerdekaan Indonesia, masih tetap terjadi polemik dalam menafsirkan politik di Indonesia. Seorang pemikir Indonesia yang bernama Mohammad Natsir bahkan pernah berbeda pendapat dengan Soekarno mengenai konsep politik dan negara. Natsir beranggapan bahwa negara dan agama adalah

sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Menjalankan urusan negara merupakan sarana untuk mengamalkan perintah agama. Natsir mencoba menggabungkan negara dan agama. Usaha yang dilakukan oleh Natsir ini membuat dia lebih dikenal sebagai pemikir politik Islam di Indonesia. Bahkan pada era Soeharto, pemikiran beliau sangat diperhitungkan oleh pemerintah.

Pandangan Natsir mengenai negara dan agama di Indonesia ini menurut penulis memiliki potensi untuk menjadi totaliter. Hal ini terlihat dari pendapat Natsir yakni :

“Bila dalam pemerintahan negara-negara berpenduduk muslim terjadi ketimpangan-ketimpangan, maka itu bukanlah suatu ukuran yang bisa dijadikan alasan untuk menolak prinsip negara dan agama. Karena itu, untuk menjadi kepala negara dalam pemerintahan Islam, ada persyaratan yang cukup ketat. Ia menyebut tentang pengetahuan agamanya, sifat, tabiat, akhlak dan kecakapannya untuk memegang kekuasaan yang diberikan kepadanya, ... bukan disandarkan kepada kemampuan intelektualnya saja... jika terjadi penyimpangan ... diselesaikan melalui musyawarah, ... mewajibkan musyawarah tentang kewajiban dan hak, antara penguasa dengan rakyatnya. ( Herry, 2006, 51)

Demokrasi seperti dalam pandangan Natsir ini sangat berbahaya karena memiliki potensi untuk terjebak dalam kekuasaan totaliter. Mengapa? Walaupun demokrasi berbicara mengenai suara mayoritas, namun bukan berarti suara mayoritas tersebut bersifat memutlakan. Jika dalam kekuasaan demokrasi bersandarkan pada mayoritas pemutlakan agama belaka, maka demokrasi tersebut tidak ada bedanya dengan totalitarianisme. Menggabungkan antara demokrasi dengan agama adalah sebuah kekeliruan. Bahkan sangat keliru menambahkan kriteria agamis tertentu bagi calon-calon yang hendak menjadi penguasa. seperti di Aceh sekarang atau kriteria primordial lain seperti etnisitas seperti sedang diperdebatkan untuk ditetapkan di Papua. Menjadi seorang penguasa dapat siapa saja. Asalkan penguasa tersebut dapat memajukan daerahnya masing-masing. Walaupun di daerah papua sendiri sekalipun, orang Sabang seharusnya diperbolehkan untuk memimpin, asal telah terpilih melalui mekanisme demokrasi yang sah. Biarkan seorang penguasa dipilih melalui pertimbangan intelektual mayoritas masyarakat. Bukan melalui pertimbangan kepercayaan atau etnisitas mayoritas. Karena jika pertimbangan kepercayaan dan

etnisitas yang menjadi acuannya, sekali lagi, demokrasi tersebut berubah menjadi totaliter.

Dalam persoalan Papua ini, memang sering kali masalah redistribusi kekuasaan kerap diangkat. Banyak diskursus yang mencoba untuk memberikan kesempatan kepada putra daerah yang selama ini teralienasikan dalam urusan memimpin daerahnya sendiri untuk mendapat prioritas daripada suku bangsa lain yang juga tinggal di daerah tersebut. Namun permasalahannya adalah politik perbedaan dalam konteks ini tidak boleh terlalu berlebihan. Jika terlalu berlebihan akan menimbulkan ketidakadilan baru. Karena politik identitas itu akan berubah menjadi penanda kepastian yang menjadi baku sehingga orang yang lahir di tanah Papua, tetapi memiliki perhatian dan merasa memiliki ikatan yang mendalam pada daerah tersebut tidak mendapat kesempatan. Jika demikian, maka politik perbedaan tersebut telah melewati batas sehingga berubah menjadi politik identitas.

Lefort jelas menolak pemikiran demokrasi semacam pemikiran Natsir ini. Bagi Lefort demokrasi merupakan arena berkompetisi secara setara dan *fair*. Jika demokrasi didasarkan pada iman agamis, maka ini jelas akan menutup kesempatan berkompetisi bagi orang yang tidak beragama mayoritas. Jika pada pola kuasa lama regenerasi kekuasaan hanya dapat terjadi dalam lingkungan kerabatnya penguasa, maka dalam demokrasi dalam pandangan Natsir ini regenerasi kekuasaan hanya dapat terjadi dalam agama mayoritas semata.

Bukan hanya pandangan Natsir mengenai negara dan agama saja yang bermasalah. Di era Soeharto berkuasa, apa yang telah dilakukan oleh Soeharto ini, menjadi sebuah saksi historis mengenai sistem totalitarianisme berkuasa di Indonesia. Alih-alih Soeharto berkuasa melalui mekanisme demokrasi, tetapi tidak dibatasi periode kekuasaannya, maka kekuasaan Soeharto selama 32 tahun ini jelas berubah menjadi totaliter. Soeharto berkuasa 5 kali periode pemilu. Kekuasaan yang terlalu lama ini memiliki potensi untuk totaliter. Menjadi totaliter karena masyarakat enggan atau bahkan takut ikut berkompetisi karena mereka sudah tahu siapa yang akan menjadi penguasa di pemilu selanjutnya. Orang menjadi enggan dan pesimis untuk berkompetisi dengan Soeharto ini, karena dia kerap melakukan kekuatan militer

untuk melancarkan keinginannya. Dengan bantuan kekuatan militer ini, kekuasaan Soeharto dapat memenuhi ruang kuasa dan tidak terganggu gugat. Hasil kekuasaannya menjadi permanen.

Pandangan Natsir dan fakta historis kekuasaan Soeharto ini menegaskan kembali bahwa konsep demokrasi sebagai ruang kosong yang digagas oleh Lefort merupakan sebuah jalan yang terbaik untuk menjaga kesetaraan politik warga negara Indonesia. Menjaga dan menjamin agar seluruh masyarakat Indonesia baik dari Sabang sampai Marauke, baik Islam, Budha, Hindu maupun Kristen memiliki hak yang sama untuk menjadi seorang penguasa. di wilayah manapun di negeri ini. Demokrasi cara yang tepat untuk memberikan hak tersebut.

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai jenis suku bangsa, agama dan ras. Fakta pluralitas ini menjadi modal agar demokrasi menjadi lebih pluralistik, sehingga pola kuasa bisa lebih proliferaatif. Caranya tentu dengan menolak konsep negara agama seperti yang digagas oleh Natsir. Karena jelas, bahwa Indonesia bukan didirikan oleh agama tertentu. Semua agama, suku, budaya yang ada di Indonesia berbaur untuk mendirikan negara ini. Oleh karena itu, orang Hindu, Budha, Kristen, Jawa, Batak, Dayak, Padang dan Bugis memiliki hak yang sama sebagai anak bangsa untuk menjadi seorang penguasa. Untuk menjamin itu negara dan agama harus dipisahkan. Dengan memisahkannya, maka tidak ada hambatan yang berasal dari agama seperti yang pernah terjadi pada monarki di Eropa, yang mendapat legitimasi kekuasaannya melalui doktrin agama.

Usaha untuk memasukan ataupun mengabungkan anasir-anasir primordial semisal agama, etnis dan kelompok, merupakan sebuah langkah kembali kepada politik totalitarianisme. Jika kita menelusuri sejarah negara ini, memang tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia terdiri dari kerajaan-kerajaan. Kerajaan yang kerap terjadi kudeta akibat meruang dan permanennya kekuasaan seorang penguasa ini. Namun setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diproklamkan ini, maka kekuasaan pada pola kuasa lama tersebut runtuh pula. Oleh karena itu, pemisahan dan penolakan secara tegas merupakan sebuah tindakan konkret dan paling tepat untuk menjaga ruang kuasa pada sistem demokrasi ini tetap kosong.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arendt, Hannah. (1995). *Asal Usul Totaliterisme Vol 3 (Terj.)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Arendt, Hannah. (1976). *The Origins of Totalitarianism*. Florida: Harcourt Brace.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Blackburn, Simon. (2005). *The Oxford Dictionary of Philosophy*. New York: Oxford University Press.
- Bramstedt, E.K. (1945). *Dictatorship and Political Police*. London: Routledge.
- Bullock, Alan. (1962). *Hitler a study in tyranny by Alan Bullock*. New York: Harper and Row.
- Edward, Paul. (1967). *The Encyclopedia of Philosophy Volume 7 and 8*. New York: Collier Macmillan Publishers.
- Fahrurodji, A (2005). *Rusia Baru Menuju Demokrasi: Pengantar Sejarah dan Latar Belakang Budayanya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Flynn, Bernard. (2005). *The philosophy of Claude Lefort: interpreting the political*, Illinois: Northwestern University Press.
- Hardiman, F.B.( 2004). *Filsafat Modern dari Machiavelli sampai dengan Nietzsche*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Hitler, Adolf. (2007). *Mein Kampf Vol 1 & 2*. Yogyakarta: Narasi.

Irwanto. (2008). *To Kill Hitler: Upaya-upaya membunuh Adolf Hitler*. Yogyakarta: Narasi..

Kohn, Hans. (1966). *Dasar Sejarah Rusia Modern*. Jakarta: Bhatara.

Lorens, Bagus. (1996) *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Lefort, Claude. (1987). *The Political Forms of Modern Society Bureaucracy, Democracy, Totalitarianism*. Cambridge: The MIT Press.

Lefort, Claude. (1988). *Democracy and Political Theory*. Cambridge: Polity Press.

Lefort, Claude. (2000). *Writing, The Political Test*, USA: Duke University Press

Lefort, Claude. (2007). *Complications; Communism and the Dilemma of Democracy*. New York: Columbia University Press.

Marchart, Oliver. (2007). *Post-Foundational Political Thought: Political Different in Nancy, Badiou and Laclau*. Edinburg: Edinburg University Press.

*The New Encyclopedia Britannica*. (2008). Chicago: Encyclopedia Britannica

Tocqueville, de Alexis. (2005) *Alexis de Tocqueville : tentang revolusi, demokrasi, dan masyarakat / Disunting oleh John Stone*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia ( bekerja sama dengan Kedutaan besar Amerika).

Zakaria, Fareed. (2003). *Masa Depan Kebebasan; Penyimpangan demokrasi di Amerika dan negara lain*. Jakarta: Ina Publikatana.

SUMBER-SUMBER LAIN :

<http://www.abigmessage.com/bahasa-blog/aceh---ketika-polisi-moral-berubah-menjadi-pemerksa.html>

<http://internasional.kompas.com/read/2011/01/16/0303438/Presiden.Tunisia.Lari.ke.Arab.Saudi>

<http://internasional.kompas.com/read/2009/10/26/05564739/Sudah.22.Tahun.Ben.Ali.Berkuasa>

<http://m.kompas.com/news/read/data/2011.02.20.08213372>

<http://internasional.kompas.com/read/2011/02/11/2302418/Hosni.Mubarak.Lengser>

<http://www.tempointeraktif.com/hg/timteng/2011/01/29/brk,20110129-309730,id.html>

<http://www.tempointeraktif.com/hg/afrika/2011/02/18/brk,20110218-314301,id.html>